



# RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI 2021-2024



# **RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI 2021-2024**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

**Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024** merupakan kelanjutan dokumen RAN-PG sebelumnya yang berisi aksi penajaman kegiatan *existing* dan operasionalisasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk percepatan pencapaian RPJMN 2020-2024 dan tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah pusat dan daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap lima tahun sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RAN-PG 2021-2024 disusun oleh Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas telah mempertimbangkan respon pangan dan gizi dalam situasi kegawatdaruratan (termasuk pandemi COVID-19) serta penguatan dimensi gender. Melalui RAN-PG, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat dalam mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

■ **Latar Belakang** – Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Indonesia berpeluang menikmati bonus demografi hanya jika kualitas SDM dipersiapkan dari saat ini, sehingga pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dengan gizi yang baik, individu-individu dari segala usia akan mampu mencapai potensi penuh mereka dan memiliki kesempatan untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi.

Masalah *Triple burden malnutrition* yang dihadapi Indonesia saat ini menempatkan pembangunan bidang pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Prevalensi *stunting* pada balita 27,67% (SSGBI, 2019), *wasting* 10,2% (Risksedas, 2018), anemia pada ibu hamil 48,9% (Risksedas, 2018), dan obesitas usia di atas 18 tahun (21,8%). Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, serta sosial inklusi yang memiliki peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, gender, agama, usia, suku, *disabilitas*, infrastruktur, teknologi dan industri, dsb. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs terutama Tujuan ke-2: Tanpa Kelaparan. Dampak paling signifikan adalah melemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan menurunnya kualitas layanan kesehatan dan gizi. Menimbang determinan permasalahan pangan dan gizi yang multidimensi, dibutuhkan instrumen yang dipedomani pemerintah dan pemangku dalam melakukan kegiatan koordinasi. RAN-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan

bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting* yang tengah gencar dilaksanakan untuk mengejar target RPJMN penurunan prevalensi *stunting* balita menjadi 14,0% pada tahun 2024. RAN-PG juga akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

■ **Tujuan** – RAN-PG 2021-2024 disusun dengan tujuan : (1) Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor; (2) Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga; dan (3) Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMN 2020-2024 dalam pembangunan pangan dan gizi.

■ **Tujuan Strategis** – Dalam operasionalisasinya, aksi penajaman dalam RAN-PG 2021-2024 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga melalui empat Tujuan Strategis (TS) yaitu:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial)
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

■ **Aksi Multisektor** – Untuk memaksimalkan efektifitas RAN-PG 2021-2024 sebagai dokumen acuan penyelenggaraan koordinasi pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah, Tujuan Strategis diterjemahkan ke dalam strategi dan aksi disertai dengan indikator keluaran dan target yang terukur disertai dengan koordinator pelaksana di setiap aksi. Susunan ini digambarkan dalam sebuah matriks yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam dokumen ini.

Secara keseluruhan, RAN-PG terdiri dari 4 TS. TS (1) terdiri dari 5 strategi dan 16 aksi; TS (2) terdiri dari 7 Strategi dan 14 Aksi; TS (3) terdiri dari 10 strategi dan 37 aksi; dan TS (4) terdiri dari 5 strategi dan 20 aksi.

■ **Tantangan** – Konsep penyusunan RAN-PG yang berbeda dengan periode sebelumnya akan menjadi tantangan tersendiri dalam mendampingi pemerintah daerah menyelenggarakan RAD-PG, begitu juga Periode RAD-PG yang diharuskan sejalan dengan periode RAN-PG. Isu kelembagaan dan situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adalah tantangan tambahan dalam penyelenggaraan rencana aksi pangan dan gizi baik di pusat maupun di daerah.

Pemantauan RAN-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAN-PG dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode. Pemanfaatan RAN-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya.







# KATA PENGANTAR

---

Ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerja sama di antara pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan koordinasi dan kerja sama adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG).

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2021-2024 merupakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RAN-PG yang disusun bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinasikan Kementerian PPN/BAPPENAS berisi aksi penajaman program dan kegiatan *existing* untuk mencapai tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs. RAN-PG tahun 2021-2024 juga mengacu kepada strategi ketahanan pangan dan gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor .... Tahun 2021 tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi. Rencana aksi ini juga telah mempertimbangkan respon pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat dan penguatan dimensi gender. Dalam rangka merepresentasikan koordinasi dan kerja sama multisektor, aksi penajaman RAN-PG dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Tujuan Strategis yaitu: yaitu: (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; (3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); (4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Dasar hukum rencana aksi ini, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi memiliki 2 (dua) lampiran utama yaitu RAN-PG tahun 2021-2024 dan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Mengingat pentingnya keberadaan RAN-PG 2021-2024 di dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, kami mengharapkan agar rencana aksi dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu hendaknya RAN-PG dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan RAD-PG.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RAN-PG Tahun 2021-2024 secara baik. Kami berharap pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Pusat dan Daerah dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi dalam menurunkan masalah *undernutritions* yaitu pendek (*stunting*), kurus (*wasting*), kekurangan zat gizi mikro, serta mengendalikan penyakit tidak menular. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, Juli 2021  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa



# UCAPAN TERIMA KASIH

---

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024 ini dapat terlaksana berkat komitmen yang tinggi dan kerja sama yang baik antara semua pihak. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga RAN-PG 2021-2024 ini dapat ditetapkan dan diterbitkan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

## PENGARAH

Subandi Sardjoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

## KETUA

Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

## PAKAR

1. Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D
2. Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S
3. Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS
4. Prof. Dr. Muhammad Firdaus, M.Si
5. Dr. Ir. Drajat Martianto, MSi
6. Dr. Arum Atmawikarta, MPH
7. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec
8. Dr. Minarto, MPS
9. Dr. Entos Zainal, MPH
10. Ir. Ahmad Syafiq, M.Sc, Ph.D
11. Ir. Diah Indarjati, M.Sc

## TIM PENYUSUN

Sidayu Ariteja (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Kementerian PPN/ Bappenas); Inti Wikanestri (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Kementerian PPN/ Bappenas); Jarot Indarto (Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/ Bappenas); Rinna Syawal (Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian); Istina Rahayu (Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian); Hera Nurlita (Direktorat Gizi Masyarakat - Kementerian Kesehatan); Zahrotus Sholuhiyah (Direktorat Gizi Masyarakat - Kementerian Kesehatan); Sintia Ramadhani (Badan Perencanaan dan Keuangan - BPOM); Didik Joko Pursito (Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan - BPOM)

**Kementerian/Lembaga Terkait Penyusunan RAN-PG 2021-2024**

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Sosial; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Agama; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; TP2AK - Sekretariat Wakil Presiden; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Kementerian Keuangan; Bulog - Kementerian BUMN; Kementerian Perdagangan; Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT); dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Tenaga Ahli Penyusun**

Sunarno Ranu Widjojo, Nur Akbar Bahar, Fitri Arkham Fauziah, Muhammad Riedha

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra SUN (*Scaling Up Nutrition*) Indonesia, terkhusus kepada **Nutrition International** (sebelumnya Micronutrient Initiative) yang telah banyak mendukung penyusunan dokumen ini, sebagai bagian dari program *Technical Assistance of Nutrition (TAN)* yang disponsori oleh UK Aid.

Semoga dokumen RAN-PG 2021-2024 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan kegiatan koordinasi pembangunan bidang pangan dan gizi di pusat, dan diacu oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.



# DAFTAR ISI

---

Ringkasan Eksekutif	v
Kata Pengantar	ix
Ucapan Terima Kasih	xi
Daftar Istilah dan Singkatan	xvii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>19</b>
A. Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia	19
B. Determinan Masalah Pangan dan Gizi	20
C. Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Kesepakatan Global	23
D. Kedudukan RAN-PG dalam Kebijakan Pembangunan Nasional	25
E. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi	26
F. Dasar Hukum Penyusunan RAN-PG	27
<b>BAB II</b>	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<b>29</b>
A. Capaian	29
B. Tantangan	36
<b>BAB III</b>	
<b>RENCANA AKSI MULTISEKTOR</b>	<b>39</b>
A. Tujuan dan Sasaran	39
B. Ruang Lingkup	41
C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	41
Pengarutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi	42
Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19	42
<b>BAB IV</b>	
<b>KERANGKA PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI</b>	<b>45</b>
A. Strategi dan Aksi	45
B. Pengorganisasian	48
Pemerintah Pusat	48
Pemerintah Daerah	49
C. Peran Sektor Non-Pemerintah	49
D. Pemantauan dan Evaluasi	50
E. Mitigasi Risiko	50
F. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya	50

**BAB V****PENUTUP**

53

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b> Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi	21
<b>Gambar 2.</b> Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs	25
<b>Gambar 3.</b> Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	26
<b>Gambar 4.</b> Trend Hasil Pengawasan Sarana IRTP Tahun 2018-2020	30
<b>Gambar 5.</b> Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Berdasarkan Kuintil Pendapatan Tahun 2020	31
<b>Gambar 6.</b> Tren Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Menggunakan AKE 2100 kkal/kap/hari Tahun 2018-2020	32
<b>Gambar 7.</b> Status Gizi Balita, 2007-2018	33
<b>Gambar 8.</b> Teori Perubahan Proses Penyelenggaraan RAN-PG 2021-2024	47

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Gizi dalam Konteks Keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	24
<b>Tabel 2.</b> Prevalensi Stunting dan Wasting di Antara Anak menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	34
<b>Tabel 3.</b> Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Umur tahun 2013 dan 2018	35
<b>Tabel 4.</b> Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024	40
<b>Tabel 5.</b> Perbedaan Konsep Penyusunan RAN-PG 2021-2024	41

**LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1.</b> Kerangka Pikir RAN-PG 2021-2024	56
<b>Lampiran 2.</b> Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024	58
<b>Lampiran 3.</b> Program dan Kegiatan Bidang Pangan dan Gizi dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024	83
<b>Lampiran 4.</b> Format Pemantauan dan Evaluasi RAN-PG	94
<b>Lampiran 5.</b> Daftar Risiko yang Dihadapi dalam Penyusunan RAN-PG dan Rencana Mitigasinya	96





# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1000 HPK	:	1000 Hari Pertama Kehidupan
ASI	:	Air Susu Ibu
AKE	:	Angka Kecukupan Energi
AKP	:	Angka Kecukupan Protein
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
B2SA	:	Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
BBLR	:	Berat Badan Lahir Rendah
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKP	:	Badan Ketahanan Pangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
COVID-19	:	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CPPOB	:	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
DALY	:	<i>Disability Adjusted Life Years</i>
DID	:	Dana Insentif Daerah
FIES	:	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
ING	:	Informasi Nilai Gizi
IQ	:	<i>Intelligence Quotient</i>
IRTP	:	Industri Rumah Tangga Pangan
kkal	:	Kilo Kalori
MP-ASI	:	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
PDB	:	Produk Domestik Bruto
POU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PNB	:	Produk Nasional Bruto
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RAN-PG	:	Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RAD-PG	:	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SIPG	:	Sistem Informasi Pangan dan Gizi
SKPG	:	Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi
SDG(s)	:	<i>Sustainable Development Goal(s)</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SSGBI	:	Survei Status Gizi Balita Indonesia
SUN	:	<i>Scaling Up Nutrition</i> – Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Stranas	:	Strategi Nasional
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNICEF	:	<i>United Nations Children's Fund</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WNPG	:	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi



# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Peran Pangan dan Gizi terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Saat ini struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif yang membuka peluang bagi Indonesia menikmati bonus demografi dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter<sup>1</sup>.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial guna tercapainya status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun. Berikut adalah dampak status gizi terhadap kualitas SDM.

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia<sup>2</sup>.
2. Kekurangan gizi pada 1000 HPK berhubungan dengan

rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun)<sup>3</sup> dan (8-11 tahun)<sup>4</sup>, bahkan gangguan kognitif bersifat permanen<sup>5</sup>.

3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi<sup>6</sup>.
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*)<sup>7</sup>. IQ anak *stunting* rata-rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal<sup>8</sup>, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah<sup>9</sup>.
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja<sup>10</sup>, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja<sup>11</sup>.

Tanpa gizi yang baik, individu-individu dari segala usia akan kehilangan kemampuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi. Malnutrisi saat ini berdampak pada 1 dari 3 orang secara global dan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan. Kebutuhan gizi ditentukan oleh jenis kelamin di satu sisi serta peran dan tanggung jawab gender di sisi lain<sup>12</sup>.

Dengan cara ini, ketidaksetaraan gender merupakan penyebab sekaligus konsekuensi dari malnutrisi. Memahami sifat multi-sektoral malnutrisi, penting untuk menyadari bahwa ketidaksetaraan gender membatasi mata pencaharian, pendidikan, dan peluang pertumbuhan bagi perempuan dan anak perempuan secara global.

Membatasi akses ke makanan bergizi dan pendidikan gizi, antara lain, memiliki dampak yang melemahkan status gizi perempuan dan anak perempuan dan berkontribusi pada kesehatan yang lebih buruk. Hal ini mengancam kesejahteraan dan peluang secara keseluruhan bagi wanita, anak perempuan, dan orang-orang dengan identitas gender yang beragam di sepanjang masa hidup dan untuk generasi selanjutnya<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan tindakan transformatif gender berkelanjutan yang diarahkan untuk mengatasi semua bentuk kekurangan gizi.

Selain itu, status gizi memiliki peran penting dalam menentukan jumlah tahun yang hilang untuk hidup sehat karena kematian dini, penyakit atau disabilitas atau lebih dikenal dengan *Disability Adjusted Life Year (DALYs)*. Di Indonesia, malnutrisi bertanggung jawab atas 11,3 juta kematian dan 241,4 juta tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan/*DALYs*. Dari 11 faktor risiko teratas yang mendorong beban penyakit global, enam terkait dengan pola makan dan gizi buruk<sup>14</sup>. Meskipun total *DALYs* berkaitan dengan penyakit menular, kesehatan ibu, neonatal dan gizi di Indonesia menunjukkan tren yang menurun, namun *dietary risk* menempati tiga besar faktor risiko yang berkontribusi terhadap *DALYs* bersama dengan tekanan darah tinggi dan konsumsi produk tembakau<sup>15</sup>.

Di sisi lain, dampak status gizi terhadap kualitas sumber daya manusia terutama pada produktivitas dan kapasitas kerja perlu mendapat perhatian yang serius karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dekat. Kerugian ekonomi dari kekurangan gizi dalam hal hilangnya produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan berkisar antara 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun<sup>16</sup>. Jika diasumsikan PDB Indonesia IDR 13.000 triliun per kapita, maka kerugian akibat kekurangan gizi berkisar IDR 260-290 triliun per tahun.

Peningkatan PDB per kapita sebesar 10 persen mengurangi prevalensi *stunting* anak sebesar 2,7 persen. Namun diperkirakan peningkatan prevalensi *stunting* anak menghasilkan penurunan 0,4 persen PDB per kapita. Perhitungan *back-of-the-envelope* menunjukkan biaya akibat *stunting* rata-rata sekitar 13,5% dari PDB per kapita di negara berkembang<sup>17</sup>. Rasio manfaat-biaya atau *return of investment* yang dapat dinikmati oleh Indonesia pada setiap satu dollar yang diinvestasikan untuk penurunan *stunting* mencapai 47,7-47,9 kali lipat<sup>18</sup>, sehingga komitmen Pemerintah Indonesia cukup serius untuk berinvestasi di bidang gizi.

Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta kualitas pelayanan kesehatan<sup>19</sup>. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan sosial inklusi yang menjadi peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, *disabilitas*, infrastruktur, teknologi dan industri, dsb. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi dunia berdampak pada terganggunya kondisi perekonomian Indonesia dengan jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan penghasilan, serta turunnya produk dalam negeri. Yang lebih parah, seiring dengan menyebarnya virus COVID-19, perekonomian Indonesia menjadi makin lemah akibat tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah penularan virus tersebut. Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Perempuan dan anak perempuan mengalami penurunan kualitas makanan, malnutrisi dan layanan penting lainnya. Hingga saat akses terhadap vaksin sudah mumpuni, virus ini masih berpotensi berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi dan, oleh karenanya, juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi sebagian besar penduduk dan menggerus perkembangan yang telah dicapai sejauh ini.

Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun. RAN-PG disusun dengan memuat penajaman strategi dan aksi guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan #2 (*menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan*) serta tujuan RPJMN 2020-2024 dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan gender serta dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19.

## B. Determinan Masalah Pangan dan Gizi

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai negara ber-penghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (*undernutrition*) te-

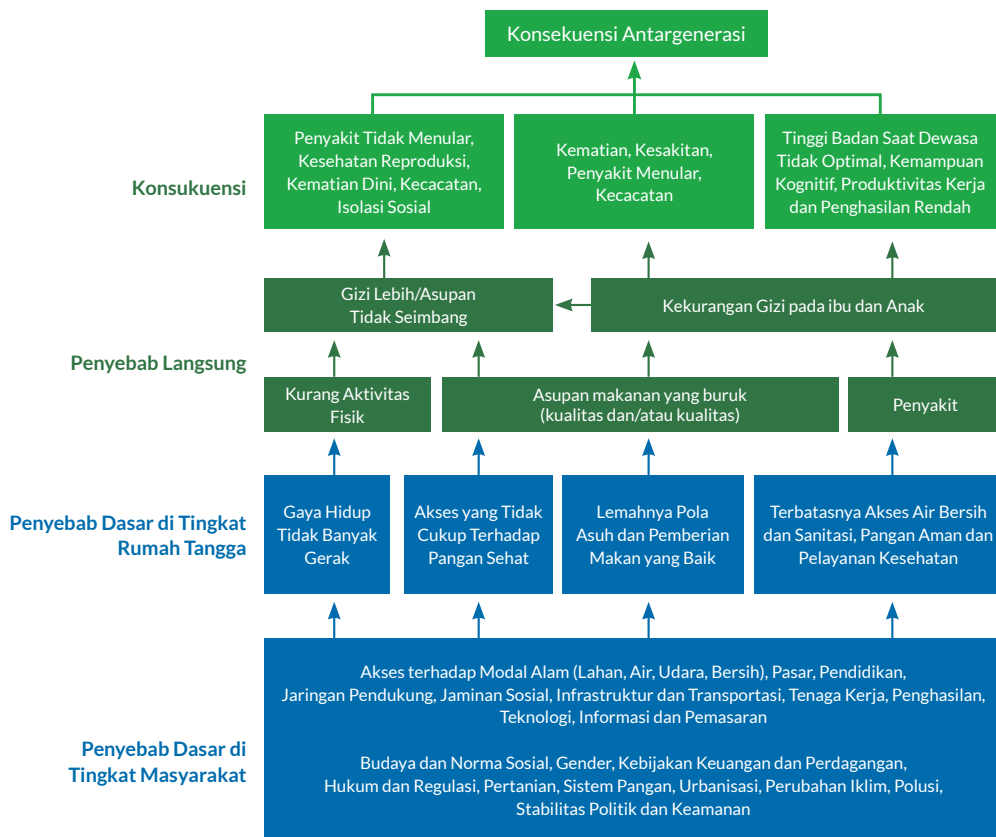
rus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan status gizi antar daerah masih tetap besar. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga menyaksikan makin tingginya prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) dan obesitas, serta defisiensi zat gizi mikro (*micronutrient deficiency*) di masyarakat.

*Triple burden malnutrition* merupakan masalah yang saat ini dialami oleh Indonesia dengan prevalensi *stunting* pada balita 27,67% (SSGBI, 2019), *wasting* 10,2% (Riskesdas, 2018), anemia pada ibu hamil 48,9% (Riskesdas, 2018), dan obesitas usia di atas 18 tahun (21,8%). Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan ke-2: Tanpa Kelaparan. Dampak paling signifikan adalah melemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan menurunnya kualitas layanan<sup>20</sup>.

Gambar 1 mengilustrasikan alur terjadinya masalah gizi yang memiliki konsekuensi antar-generasi. Kerangka tersebut menunjukkan jalur interaksi berbagai penyebab malnutrisi dari tingkat masyarakat ke tingkat rumah tangga dan individu. Tiga penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik, kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Seperti pada kasus pada balita *stunting* yang banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 25% anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami *stunting*, dibanding 43% anak dari desil termiskin.

Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan (kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku, dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif selama enam bulan pertama dan pendidikan orang tua<sup>21</sup>.

**Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi**



Sumber : Diadaptasi dari ASEAN, UNICEF, WHO dalam *Regional Report on Nutrition Security in ASEAN Volume 2, 2016*

## Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman.

Masalah malnutrisi lainnya adalah kelebihan gizi yang juga tidak lepas juga dari faktor sosio-ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk faktor lingkungan, secara umum kelebihan gizi lebih banyak ditemukan di perkotaan daripada di perdesaan. Pada orang dewasa, data RISKESDAS 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% orang dewasa di perdesaan mengalami obesitas, sementara di perkotaan angkanya lebih tinggi, yaitu 25,1%. Individu dari kelompok pendapatan lebih tinggi juga lebih rentan terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Setiap 1% peningkatan kesejahteraan rumah tangga berkaitan dengan kenaikan kemungkinan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas sebesar 0,6 poin persentase<sup>16</sup>. Meskipun demikian, sejumlah bukti menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan gizi terjadi secara lebih cepat di kalangan rumah tangga miskin. Data menunjukkan bahwa konsumsi makanan olahan meningkat dan tingkat aktivitas fisik telah menurun selama dekade terakhir. Daerah perkotaan, status ekonomi dan pendidikan tinggi serta konsumsi makanan olahan dikaitkan dengan kemungkinan kelebihan berat badan yang lebih tinggi di antara kebanyakan orang dewasa dan anak-anak<sup>22</sup>.

Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.

Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa jaminan sosial/bantuan/subsidi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk

pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Penyusunan RAN-PG dan RAD-PG telah mempertimbangkan penyebab permasalahan pangan dan gizi yang secara multisektor di berbagai level. Strategi yang disusun telah memprioritaskan intervensi spesifik gizi dan sensitif dengan keterlibatan sektor dan pemangku kepentingan terkait secara terkoordinasi.

### C. Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Kesepakatan Global

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada RPJMN 2020-2024, juga memperhatikan beberapa komitmen global, di antaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan *The UN Decade of Action on Nutrition 2016-2025*.

Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan *wasting* pada balita kurang dari 5 persen; 7) Tidak ada peningkatan kelebihan berat badan pada anak.

Selanjutnya agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan telah menyepakati pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target global yang ingin dicapai pada tahun 2030 untuk tujuan kedua SDGs “*menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan*” sebagai berikut:

- a. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang hidup.
- b. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manual.
- c. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.<sup>23</sup>

Tanpa investasi yang memadai dan berkelanjutan untuk nutrisi yang baik, SDGs tidak akan terwujud. Ambisi untuk ‘Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan’ tercakup dalam SDG 2, namun, setidaknya 12 dari 17 Tujuan berisi indikator yang sangat relevan dengan gizi<sup>24</sup>. Malnutrisi akan menjadi hambatan yang seringkali tidak terlihat untuk keberhasilan pencapaian SDGs. Ini bukan hanya hasil dari kurangnya pangan yang cukup dan bergizi dan aman, tetapi dari sejumlah faktor terkait yang menghubungkan kesehatan, pola asuh, pendidikan, air, sanitasi dan kebersihan, akses ke makanan dan sumber daya, pemberdayaan perempuan, dan banyak lagi.

Perbaikan gizi adalah hal penting untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian TPB/SDGs. Pada saat yang sama beberapa TPB/SDGs juga berdampak pada pencapaian perbaikan gizi yang baik. Oleh karena itu, pendekatan multisektor terhadap peningkatan ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang penting. Adapun keterkaitan gizi dengan setiap TPB/SDGs dapat dilihat pada Tabel 1.

Sejalan dengan komitmen WHA (2012) dan SDGs (2015), komitmen global lainnya yang direspon baik oleh Indonesia adalah *The United Nations (UN) Decade of Action on Nutrition* pada tahun 2016 menandai ambisi dan arah baru aksi gizi: *memberantas kelaparan, dan malnutrisi dalam segala bentuknya (kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, kelebihan berat badan atau obesitas) dan mengurangi beban terkait diet penyakit tidak menular (PTM) di semua kelompok umur*. Tujuan utamanya meningkatkan investasi gizi dan melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dalam kerangka yang disepakati di *2<sup>nd</sup> International Conference on Nutrition (ICN2)*, dengan enam bidang aksi penting yaitu: 1) Sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh untuk pola makan yang sehat; 2) Sistem kesehatan yang selaras menyediakan cakupan universal dari aksi gizi esensial. 3) Perlindungan sosial dan pendidikan gizi; 4) Perdagangan dan investasi untuk perbaikan gizi; 5) Lingkungan yang aman dan mendukung status gizi di segala usia; 6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas untuk perbaikan gizi.

**Tabel 1. Gizi dalam Konteks Keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kaitan dengan Gizi
1	Menghapus Kemiskinan	Kemiskinan membatasi akses individu mendapatkan pangan yang baik
2	Mengakhiri Kelaparan	Produksi pangan yang tidak berkelanjutan menyebabkan kekurangan gizi
3	Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan	Asupan gizi yang sehat dan berkelanjutan dapat menurunkan kematian dini termasuk akibat penyakit tidak menular
4	Pendidikan Bermutu	Malnutrisi memengaruhi kemampuan belajar dan kesadaran yang tinggi dapat memengaruhi pilihan makanan yang sehat dan berkelanjutan
5	Kesetaraan Gender	Memberdayakan perempuan untuk menuntut hak mereka mengarah pada peningkatan kualitas hidup; mendapatkan asupan gizi yang tepat; yang dapat diterjemahkan menjadi peluang kerja yang lebih baik
6	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Akses ke air bersih dan sanitasi layak dapat mengurangi kekurangan gizi
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Menciptakan kemandirian dari bahan bakar fosil akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan serta memastikan ketahanan pangan
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta pertanian berkelanjutan
9	Infrastruktur, Industri, dan Inovasi	Akses yang terjangkau ke teknologi dan infrastruktur sangat penting untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan
10	Mengurangi Ketimpangan	Ketidaksetaraan menyebabkan ketimpangan pendapatan, akses pangan, kesehatan dan pendidikan
11	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Ekspansi ke pedesaan meningkatkan kebutuhan pangan, menciptakan persaingan sumber makanan dan air yang akhirnya bergantung pada pembelian pangan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Memenuhi kebutuhan gizi populasi global yang terus berkembang membutuhkan solusi berkelanjutan untuk produksi pangan dan akses ke air bersih, karena produksi pangan yang tidak terkendali dan tidak efisien menyebabkan emisi gas rumah kaca dan degradasi tanah.
13	Penanganan Perubahan Iklim	Perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan global, ketahanan pangan serta akses ke sumber air bersih
14	Menjaga Ekosistem Laut	Akuakultur mengurangi kelaparan dan meningkatkan gizi; namun, penangkapan ikan berlebihan membatasi keanekaragaman hayati
15	Menjaga Ekosistem Darat	Alih fungsi lahan menyebabkan degradasi tanah sekaligus mengurangi keanekaragaman hayati dan produksi pangan, serta akses ke sumber air bersih
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	Perang menyebabkan gizi buruk dan kematian karena persediaan makanan yang tidak mencukupi, serta ketidakamanan dan berkurangnya akses ke pangan yang baik
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan dan gizi dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dan sektor terkait yang beragam



### D. Kedudukan RAN-PG dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

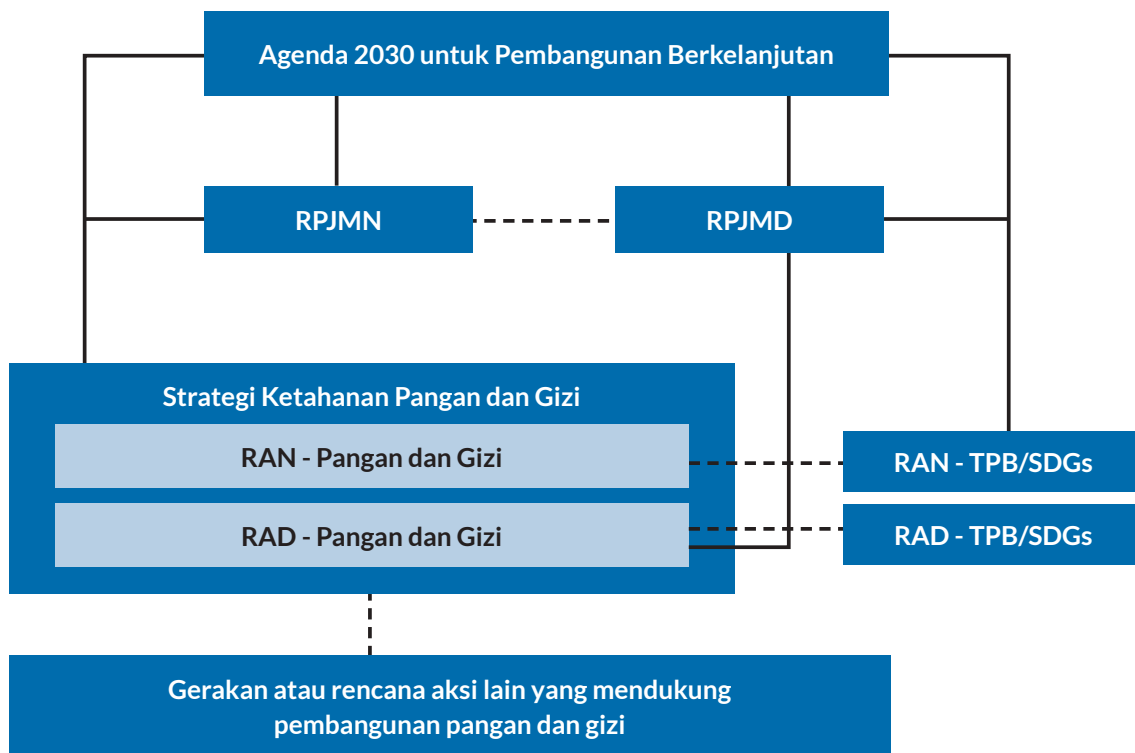
Melihat komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan tersebut. Posisi RAN-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional maupun RAN lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas PUG melalui PPRG.

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAN-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah dengan sektor atau pemangku

kepentingan dalam mencapai TPB, terutama tujuan kedua. Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMN, penyusunan RAN-PG diarahkan untuk penajaman program/kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMN termasuk yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian dokumen RAN-PG dapat diacu untuk menyusun Renja kementerian/lembaga dan RKP. Sama halnya di daerah, RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD, . Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 3.

Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.

Gambar 2. Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs



Keterangan  
 - - - - - : disinkronkan  
 ————— : mengacu

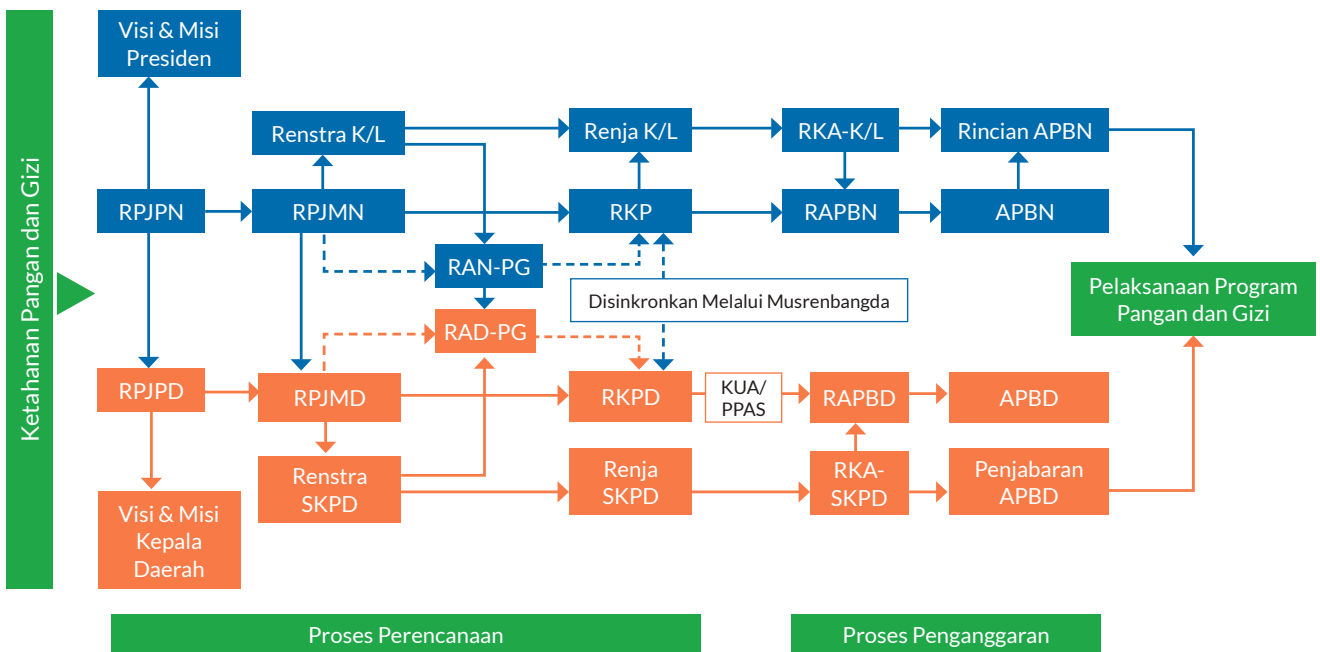
### E. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan #1 yaitu *memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan*

*berkeadilan* dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan #3 yaitu *meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*. Perbaikan ekonomi yang membaik saat ini akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Di tengah upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai

Gambar 3. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Agenda 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memberantas kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan paling lambat pada 2030.

Prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui

peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;

- c. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
- d. Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
- e. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:

- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- c. Percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- d. Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
- e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- f. Penguatan sistem surveilans gizi;
- g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RAN-PG 2021-2024 yaitu:

- a. *Pembangunan berkelanjutan* – pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
- b. *Pengarusutamaan gender* – mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

- c. *Media sosial dan budaya* – internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
- d. *Trasformasi digital* – mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

## F. Dasar Hukum Penyusunan RAN-PG

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RAN-PG:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
7. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RAN-PG 2021-2024 yaitu: pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, media sosial dan budaya dan transformasi digital.

# TANTANGAN

# CAPAIAN

MITRA  
PEMBANGUNAN

AKADEMIA

BISNIS

PEMERINTAH

LSM



# BAB 2

## ANALISIS SITUASI

---

### A. Capaian Bidang Pangan

#### 1. Ketersediaan Pangan

Pada periode 2015-2020, produksi pangan strategis cenderung meningkat, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah yang mengalami peningkatan sebesar 9,6% diikuti oleh telur ayam ras (6,1%), daging sapi (4,4%), cabai rawit (3,2%) dan beras (0,6%). Penurunan produksi terjadi untuk komoditas cabe besar dan daging ayam ras masing-masing menurun sebesar 1,4% dan 11%. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID 19 yang menyebabkan daya beli yang berdampak pada respon produsen daging ayam ras untung mengurangi produksi sesuai penurunan permintaan pasar.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 diketahui bahwa ketersediaan komoditas bahan pangan strategis telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhir bulan Desember 2020 diperoleh neraca surplus, seperti beras yang mengalami surplus 6,7 juta ton. Kondisi tersebut menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masa pandemi, walaupun ada kekhawatiran dalam memenuhi permintaan dalam negeri akibat pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kuartal pertama 2020, menurut perbandingan antar tahun, produksi pangan di Indonesia mengalami kontraksi sebesar 10%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun sebelumnya sehingga periode panen padi tergeser ke kuartal kedua 2020 dengan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Beberapa laporan juga menyatakan bahwa produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan

buah dan sayuran. Permintaan per kapita untuk buah naik sebesar 2,9% setiap tahun antara 2000 dan 2015, sementara permintaan per kapita untuk sayuran tumbuh sebesar 2,4% per tahun selama periode yang sama<sup>25</sup>. Namun, pertumbuhan rata-rata produksi buah dalam negeri hanya sebesar 2% setiap tahunnya, naik dari 18,3 juta ton pada 2013 menjadi 19,6 juta ton pada 2018. Akibatnya, impor buah naik dari 0,5 juta ton pada 2013 menjadi hampir 0,7 juta ton pada 2018. Produksi sayuran juga mengalami tren serupa. Meski produksi dalam negeri naik dari 11,6 juta ton pada 2013 menjadi 12,5 juta ton pada 2018, impor sayuran naik dari 0,8 juta ton menjadi 0,9 juta ton dalam periode yang sama<sup>26</sup>.

Di sisi lain, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat. Surplus beras sekitar 6,7 juta ton pada tahun 2020 dan untuk komoditas daging sapi surplus 43 ribu ton dan daging ayam ras surplus 381 ribu ton. Selama kurun waktu tahun 2019-2020 telah terjadi penurunan sebesar 7,9% jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 76 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 70 kabupaten/kota pada tahun 2020. Pada kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan 1,4% kabupaten/kota yang tahan pangan atau naik dari 438 kabupaten/kota pada tahun 2019 menjadi 444 kabupaten/kota pada tahun 2020.

Produksi ikan dan konsumsi ikan terus mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 14,1 juta ton dan 50,7 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. Ketersediaan protein dari sumber-sumber dalam negeri selain daging sapi mengalami tren peningkatan. Namun, meski ketersediaan ikan dan produksi telur dan daging ayam mengalami peningkatan, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang beragam.

Selain aspek produksi, keamanan pangan merupakan prasyarat dasar produk pangan, sehingga penjaminan pangan harus selalu melekat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Keamanan pangan perlu dilakukan di sepanjang rantai pangan mulai dari lahan pertanian, produksi, distribusi, maupun konsumsinya. Situasi keamanan pangan pada proses produksi di sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) selama 3 tahun terakhir pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut sebesar 79,30%, 78,38% dan 73,77% seperti yang tersaji pada Gambar 4.

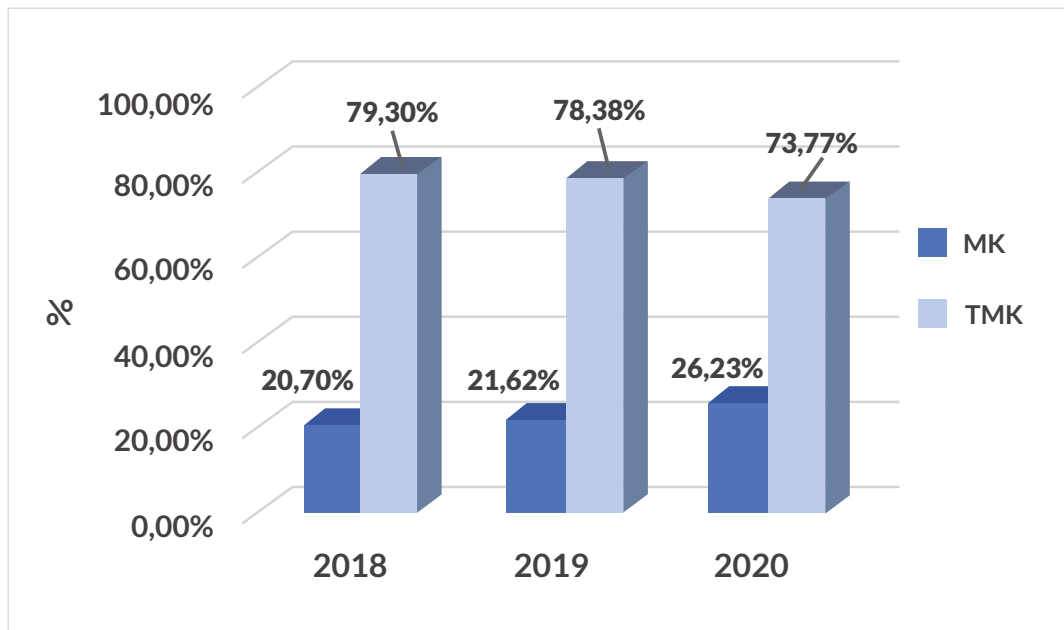
Tantangan yang dihadapi masih tingginya IRTP yang tidak memenuhi ketentuan terkendala oleh fasilitas dan implementasi *higiene* dan sanitasi sarana yang masih kurang, konstruksi sarana yang belum sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang berpengaruh terhadap penjaminan mutu, serta belum adanya sistem dokumentasi yang memadai. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada makanan beredar yang memenuhi syarat yang persentasinya saat ini di angka 76% (BPOM, 2019).

## 2. Keterjangkauan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, dalam pemenuhannya harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai anjuran, untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 ketersediaan energi telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari sebagaimana rekomendasi WNPG tahun 2018. Demikian juga untuk konsumsi energi telah melampaui angka kecukupan konsumsi ideal yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Skor AKE ketersediaan maupun AKE konsumsi tahun 2020 masih di atas rekomendasi, yaitu AKE

Ketersediaan telah mencapai 2.755 di atas skor ideal 2.400 kkal/kap/hari dan AKE Konsumsi telah mencapai 2.112 di atas skor ideal 2.100 kkal/kap/hari. Demikian juga untuk Skor AKP ketersediaan maupun AKP konsumsi tahun 2020 masih di atas rekomendasi, yaitu AKP Ketersediaan telah mencapai 81,4 di atas skor ideal 62 gram/kap/hari

Gambar 4. Trend Hasil Pengawasan Sarana IRTP Tahun 2018-2020



dan AKP Konsumsi telah mencapai 61,98 di atas skor ideal 57 gram/kap/hari.

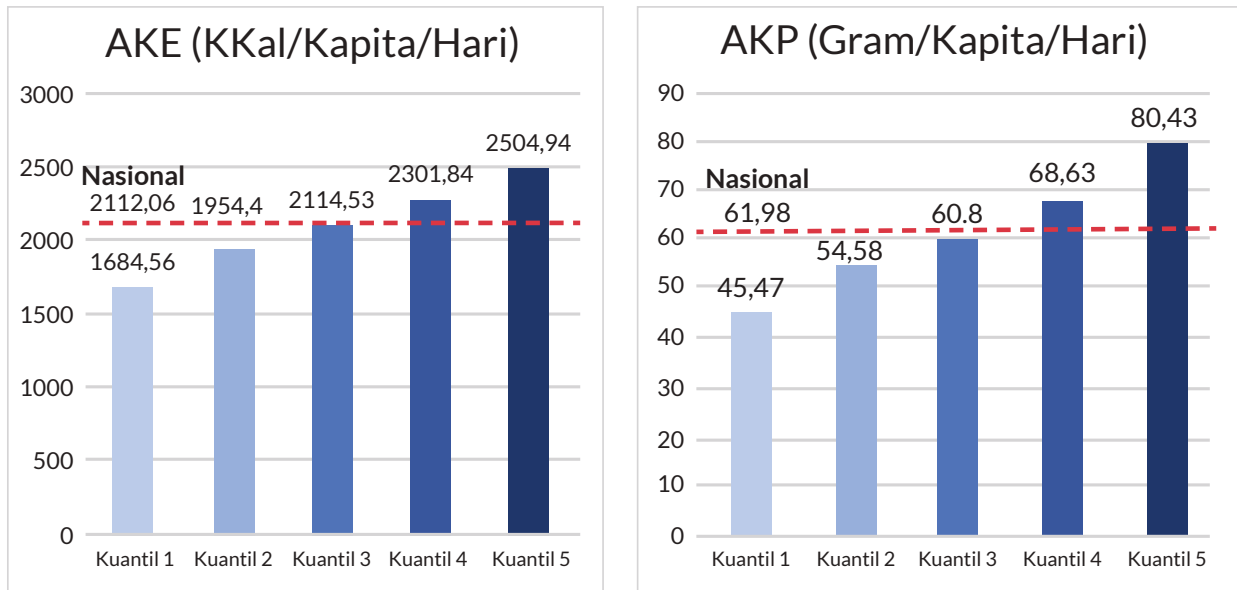
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan dukungan kondisi geografis yang

beragam, iklim dan cuaca yang mendukung serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 270,20 juta penduduk Indonesia (Sensus Penduduk,

2020) maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sepatasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multi-sektor dan multi-pemangku kepentingan.

Dampak pandemi COVID-19 telah memberi kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, seperti skor AKE tahun 2020 walaupun di atas anjuran, namun untuk komoditas umbi-umbian, pangan hewani, buah/

**Gambar 5. Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) Berdasarkan Kuintil Pendapatan Tahun 2020**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020

biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah masih belum mencapai AKE yang ideal. Namun untuk padi-padian serta minyak dan lemak telah melampaui skor AKE ideal. Dikaitkan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

Menurut BPS, prevalensi PoU yang didefinisikan sebagai “asupan kalori di bawah kebutuhan minimum energi makanan” menurun dari 10,73% pada tahun 2015 menjadi 8,60% pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang mengalami gizi kurang turun dari 39,8 juta pada 2011 menjadi 21 juta pada 2018. Menurut Indeks Kelaparan Global—yang mengukur multidimensi kelaparan dengan menggabungkan gizi kurang, *stunting*, *wasting*, dan mortalitas anak—proporsi penduduk berisiko kelaparan di Indonesia turun dari 9,1% pada 2011–2013 menjadi 8,3% pada 2016–2018, atau berkurang dari 22,3 juta menjadi 21,7 juta penduduk<sup>27</sup>.

Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin di negara ini. BPS menunjukkan bahwa seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 1,3% yang dialami Indonesia pada

kuartal pertama 2020, tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2% menjadi 9,8% antara September 2019 dan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,6 juta jiwa, yaitu meningkat dari 24,8 juta jiwa menjadi 26,4 juta jiwa dalam periode tersebut.

Akan ada lebih banyak penduduk miskin dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan memengaruhi perekonomian secara lebih parah. COVID-19 dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 1.3 juta sampai 19,7 juta penduduk, tergantung pada tingkat keparahan kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini<sup>28</sup>. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga daya beli penduduk miskin dan rentan.

### 3. Pemanfaatan Pangan

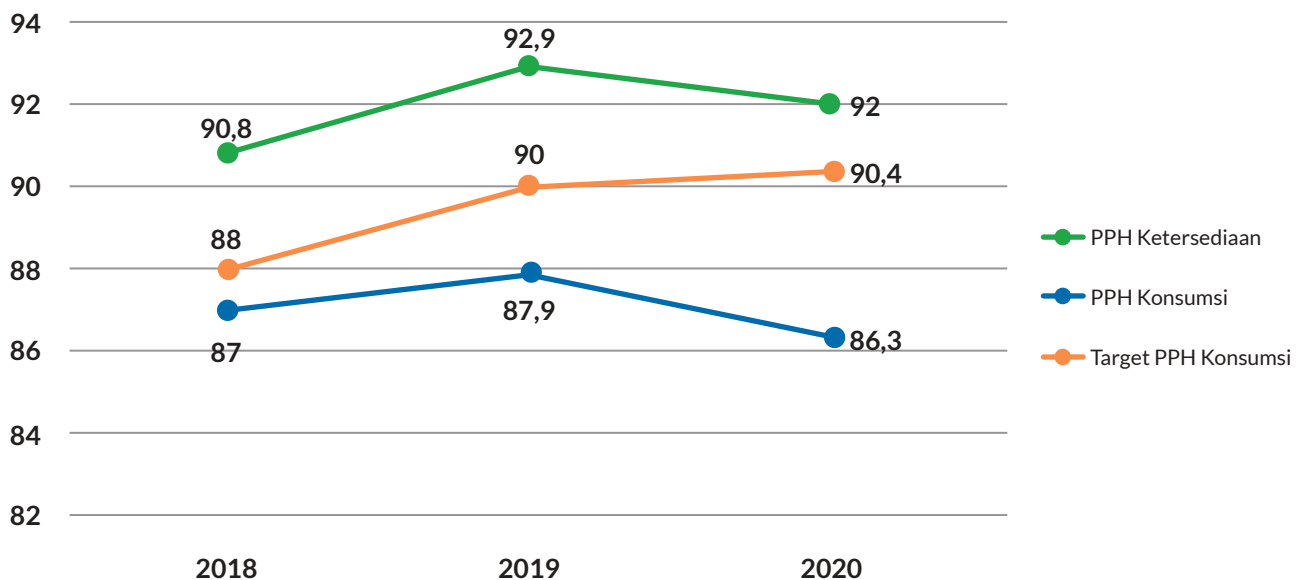
Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan

minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 PPH konsumsi masih di bawah target konsumsi meskipun ketersediaan pangan sudah melebihi target kebutuhan. PPH Ketersediaan mencapai skor 92 di atas skor PPH Konsumsi mencapai skor 86,3, (berdasarkan AKE 2000 kkal/kap/hari).

Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan membeli pangan, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Dampaknya asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsi juga semakin rendah, sehingga peran *social safety net* berupa bantuan pangan menjadi hal penting agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Meski demikian, karbohidrat tetap mendominasi asupan kalori sebagian besar penduduk Indonesia meski PNB per kapita terus mengalami peningkatan dalam satu dasawarsa terakhir. Konsumsi beras tetap tinggi di negara

Gambar 6. Tren Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Menggunakan AKE 2100 kkal/kap/hari Tahun 2018-2020



ini. Menurut BKP (2018) rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun bahkan sedikit naik dari 96,3 kg pada 2013 menjadi 97,1 kg pada 2018. Selama periode yang sama, rata-rata konsumsi tepung gandum per kapita per tahun juga naik dari 10,1 kg menjadi 18,1 kg. Akibatnya, asupan beras dan sereal lain menyumbang kurang lebih 65,7% dari total asupan kalori penduduk Indonesia pada 2018. Angka ini jauh lebih tinggi daripada angka rujukan sebesar 50% yang direkomendasikan oleh Pola Pangan Harapan (PPH).

BKP (2019) mengungkapkan bahwa konsumsi ikan yang menjadi sumber protein paling penting mengalami sedikit peningkatan dari 19,5 kg per kapita per tahun pada 2013 menjadi 20,7 kg per kapita per tahun pada 2018. Kenaikan

konsumsi daging lebih tinggi daripada konsumsi ikan. Selama 2013–2018, konsumsi daging unggas per kapita per tahun naik dari 5,0 kg menjadi 7,2 kg dan konsumsi daging sapi dari 1,3 kg menjadi 4,5 kg.

Konsumsi buah dan sayuran yang dibutuhkan untuk menjaga gizi yang sehat dan seimbang juga rendah di Indonesia. Menurut WHO, seseorang dianggap memiliki asupan buah dan sayuran yang cukup jika ia makan lebih dari lima porsi buah dan sayuran per hari. Namun, Risesdas 2018 menunjukkan bahwa hanya 4,6% penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengonsumsi cukup buah dan sayuran. Sebagian besar responden (66,5%) menyatakan bahwa mereka hanya mengonsumsi satu atau dua porsi buah dan sayuran per hari.



Telah terjadi perubahan besar pada pola pengeluaran untuk pangan. Porsi pengeluaran untuk makanan siap saji naik cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. BPS (2019) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan siap saji naik dari 25,9% dari total belanja pangan pada 2013 menjadi 34% pada 2019. Kenaikan ini terjadi seiring dengan makin berkurangnya pengeluaran untuk beras dan sereal, sayuran, telur dan susu, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, kacang-kacangan dan tembakau dan sirih. Hanya porsi belanja daging dan umbi-umbian yang mengalami sedikit kenaikan selama periode ini.

### Bidang Gizi

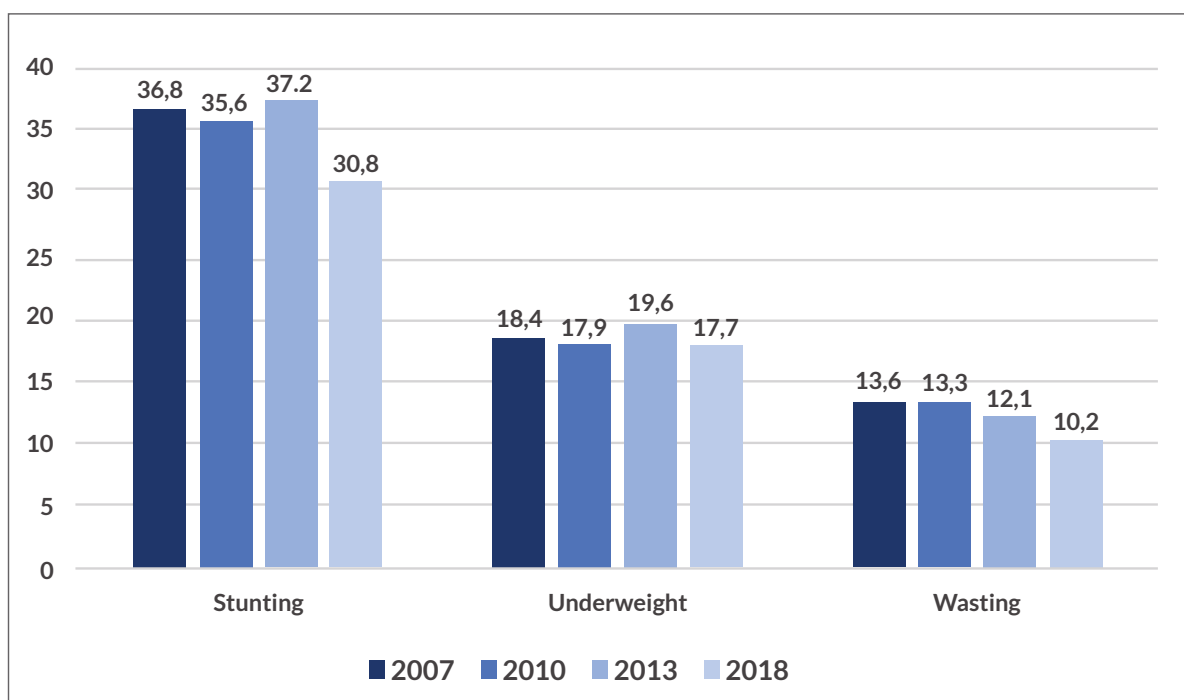
Pembangunan pangan masih dihadapi oleh permasalahan *triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas) dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Selama periode 2013–2018, Indonesia mencapai peningkatan bermakna dalam penurunan *stunting*, begitu juga *wasting* dan *underweight*. Di kalangan balita, data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* dan berat badan kurang (*underweight*) turun masing-masing dari 37,2% dan 19,6% pada 2013 menjadi 30,8% dan 17,7% pada 2018. Penurunan ini cukup luar biasa karena Indonesia mengalami kenaikan prev-

alensi *stunting* dan berat badan kurang antara 2007 dan 2013 (Gambar 3). Pencapaian serupa juga diraih dalam penurunan prevalensi *wasting* di antara kelompok usia ini, dari 12,1% pada 2013 menjadi 10,2% pada 2018.

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan penurunan *stunting* sebagai Prioritas Nasional pemerintah dengan mengatasi permasalahan gizi melalui kerjasama multisektor. Komitmen yang kuat ini dimulai oleh perhatian Bapak Presiden Indonesia untuk pemenuhan gizi untuk keluarga miskin yang ditindaklanjuti oleh diterbitkannya Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Wakil Presiden.

Keberhasilan pengintegrasian intervensi spesifik dan sensitif gizi yang mulai difokuskan sejak 2017 melalui kabupaten/kota/desa prioritas juga memegang peranan penting dalam penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Walaupun prevalensi *stunting* balita telah menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat pada Gambar 7, Pemerintah Indonesia tetap memperhatikan penanganan permasalahan gizi lainnya. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan penyusunan dan pemanfaatan rencana aksi pangan dan gizi dalam sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah gizi di Indonesia.

Gambar 7. Status Gizi Balita, 2007-2018



Sumber: Riskesdas 2007; 2010; 2013; 2018

Jika menyoal jenis kelamin, masih terjadi disparitas antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada semua kategori usia, prevalensi *stunting* dan *wasting* sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki daripada pada anak perempuan (Tabel 2).

Prevalensi *undernutrition* (*stunting*, *underweight*, dan *wasting*) tidak merata di antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada balita, gizi kurang lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan daripada di perkotaan. Menurut data Riskesdas (2018), 34,9% anak usia di bawah 5 tahun di wilayah perdesaan mengalami *stunting*, sementara 27,3% anak usia di bawah 5 tahun di wilayah perkotaan mengalami kondisi serupa. Prevalensi berat badan kurang dan *wasting* juga lebih tinggi di wilayah perdesaan yang 20% balitanya mengalami berat badan kurang dan 10,7% mengalami *wasting*. Di wilayah perkotaan, 15,7% anak usia di bawah 5 tahun mengalami berat badan kurang dan 9,8% mengalami *wasting*.

Perlu diperhatikan bahwa *stunting* banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa 25% anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami *stunting*, dibanding 43% anak dari desil termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan (kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku, pola asuh, dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif dan pendidikan orang tua<sup>29</sup>.

Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi justru meningkat. Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa mencapai 35,4%, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8%. Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari 11,9% menjadi 8% antara 2013 dan

Tabel 2. Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* di Antara Anak menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Kategori Usia	Stunting (%)		Wasting (%)	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Dibawah 5 Tahun	29,7	31,7	9,2	11,1
5-12 tahun	22,8	24,5	8,2	10,1
13-15 tahun*	24,9	26,5		
16-18 tahun	25,0	28,8	4,3	11,8

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2019

\*) Laporan Riskesdas 2018 tidak menyertakan jumlah *wasting* menurut jenis kelamin untuk kategori usia ini.

2018, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok umur.

Di sisi lain, persoalan gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia, terlihat dari tingkat obesitas pada perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Riskesdas 2018 menunjukkan 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa. Secara hormonal,

perempuan lebih gampang gemuk dibandingkan laki-laki. Penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur metabolisme tubuh pada periode pasca pernikahan dapat menjadi salah satu pemicunya, terlebih saat seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Faktor kontekstual yang berbeda mendorong perbedaan dalam konsumsi makanan, meski perempuan dilaporkan lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki, namun saat yang sama perempuan juga lebih banyak mengonsumsi makanan

manis, dibandingkan laki-laki. Perempuan yang berstatus kawin, berpendapatan tinggi, tinggal di perkotaan, beraktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan dan minuman manis >10% AKE, mengonsumsi karbohidrat >55% AKE, serta berpendidikan tinggi berisiko mengalami kegemukan berturut-turut 2.712, 1.566, 1.358, 1.213, 1.100, 1.119, 0.817 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembandingnya<sup>30</sup>.

Masalah gizi lain yang dihadapi Indonesia adalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan vitamin A (KVA), dan lain-lain. Masalah kekurangan zat gizi mikro ini sering sekali menimbulkan masalah gizi yang tidak tampak sehingga disebut sebagai kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*). Dari berbagai survei konsumsi, diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat hanya mampu memenuhi sekitar 40-60% kebutuhan zat gizi mikro sehari khususnya vitamin A, iodium dan zat besi. Data terakhir masalah gizi mikro menunjukkan bahwa sebanyak 37,1% ibu hamil dan 28,1% balita menderita anemia (Risikesdas 2013). Kondisi anemia pada ibu hamil ini meningkat prevalensinya menjadi 48,9% di tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Di sisi lain, meskipun secara klinis kekurangan vitamin A sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, namun masih ada sekitar 0,8% anak usia 5-12 tahun mengalami kurang vitamin A subklinis (SEANUTS 2011). Demikian pula dengan masalah kurang iodium yang ditunjukkan oleh Risikesdas 2013 bahwa berdasarkan metode *rapid test* kadar iodium dalam garam, sebanyak 91,9% didapatkan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung iodium. Namun persentasinya akan lebih rendah lagi jika ditilik dengan menggunakan metode titrasi. Hanya sekitar setengah atau 47,2 persen dari masyarakat yang mengonsumsi garam beryodium secara memadai (18 ppm). Hal ini jauh di bawah target nasional dan global yang direkomendasikan konsumsi garam beryodium masyarakat di atas 90 persen. Kondisi konsumsi garam beryodium masyarakat ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 56,5 persen. Metode lain untuk melihat kadar iodium dalam tubuh dapat dilihat melalui MUIC (*Median Urinary Iodine Concentration*) dengan cut off yang direkomendasikan adalah 100-299µg/L. Diketahui bahwa kadar iodium pada kelompok umur anak usia sekolah (6-12 tahun) cenderung tinggi 215 µg/L dibandingkan perempuan usia subur (15-49 tahun) 215 µg/L, dan ibu hamil 169µg/L.

Tabel 3. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Umur tahun 2013 dan 2018

Kategori Usia Ibu Hamil	Prevalensi Anemia (%)	
	Tahun 2013	Tahun 2018
15-24 Tahun	N/A	84,6
25-34 tahun	N/A	33,7
35-44 tahun	N/A	33,6
45-54 tahun	N/A	24,0
<b>Total</b>	<b>37,1</b>	<b>48,9</b>

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2018

Dalam upaya penanggulangan masalah gizi mikro pemerintah telah melaksanakan program suplementasi gizi sejak tahun 1970-an hingga saat ini, seiring dengan upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang. Selanjutnya program dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yaitu melalui program fortifikasi pangan. Fortifikasi Pangan telah didokumentasikan sebagai bagian dari program nasional perbaikan gizi masyarakat. Fortifikasi Pangan juga diakui sebagai intervensi yang dinilai “*cost effective*” untuk menanggulangi defisiensi zat gizi mikro karena mampu menjangkau semua kelompok masyarakat dari berbagai kalangan.

### Kontribusi RAN-PG 2017-2019 dan RAD-PG terhadap Capaian Pangan dan Gizi

1. Dukungan RAN-PG di dalam implementasi kebijakan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
2. Dukungan RAN-PG terhadap implementasi *food system* di Indonesia
3. Dukungan RAN-PG di dalam penguatan koordinasi dan kelembagaan pangan dan gizi di pusat dan daerah
4. Dukungan RAN-PG dalam penanganan isu ketidakadilan seperti gender, kesenjangan pendapatan dll

Pada Desember 2020, sebanyak 31 provinsi dan 112 kabupaten telah memiliki RAD-PG, dimana 22 di antaranya RAD-PG telah ditetapkan ke dalam Peraturan Gubernur, dan 90 Peraturan Bupati. Keberadaan RAD-PG menempati peran strategis dalam menentukan arah kebijakan gizi di daerah beserta pelibatan multisektor sehingga keberadaan tim koordinasi RAD-PG yang sudah ada di daerah dapat dijadikan alternatif tim koordinasi yang sama untuk konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

## B. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. **Tantangan Aspek Ketersediaan** - Peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Masih tingginya ketergantungan terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi COVID-19.
2. **Tantangan Aspek Keterjangkauan** - Sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di

bawah kebutuhan pangan minimum pada 2018, meski prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) terus menurun. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan akses pangan.

### 3. Tantangan Aspek Pemanfaatan :

- a. Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan.
- b. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan anak usia 6 sampai 12 tahun, remaja, dan orang dewasa, meski permasalahan gizi balita di Indonesia menurun sejak 2013. Bukti juga menunjukkan bahwa defisiensi zat gizi mikro banyak terjadi meski data yang representatif belum dikumpulkan selama bertahun-tahun. Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial menjadi tantangan kuat bagi kemajuan yang telah dicapai selama ini.

### 4. Tantangan Aspek Kelembagaan dalam Pelaksanaan RAN-PG 2017-2019 dan RAD-PG

- a. Forum koordinasi RAN-PG di pusat masih mengandalkan gugus tugas percepatan perbaikan gizi, sehingga diperlukan penataan forum koordinasi untuk kepentingan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi.
- b. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah
- c. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah
- d. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung aksi #2 pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah.
- e. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi.



# RENCANA AKSI MULTISEKTOR

- ✓ KESEHATAN GIZI
- ✓ PERTANIAN
- ✓ SOSIAL
- ✓ PENDIDIKAN
- ✓ GENDER
- ✓ PEMERINTAHAN



# BAB 3

# RENCANA AKSI

# MULTISEKTOR

---

## A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RAN-PG 2021-2024 adalah:

- a. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
- c. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMN 2020-2024 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. RAN-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut (Table 4), dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB.

Indikator pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana tercantum pada Tabel 4, dapat diacu dan diselaraskan pelaksanaannya di daerah melalui penajaman aksi yang dirumuskan pada RAD-PG sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing

**Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.**

Tabel 4. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Baseline	Target 2024
<b>Intermediate Outcome</b>			
1	Ketersediaan Beras (juta ton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	2,9
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4 <sup>b)</sup>	95,2
6	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121 <sup>b)</sup>	46,8
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 <sup>b)</sup>	2,9
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i> )	6,7 <sup>b)</sup>	5,7
9	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat ( <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> )	5,8 <sup>b)</sup>	3,1
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	50,7 <sup>c)</sup>	95,2
11	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 <sup>b)</sup>	14,6
12	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9 <sup>b)</sup>	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3 <sup>b)</sup>	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 a) <sup>1)</sup>	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton <sup>2)</sup>	100% penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
<b>Outcome</b>			
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Risksdas, 2018)	7
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Risksdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Keterangan :

<sup>1)</sup> Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target

<sup>2)</sup> Uji coba beras fortifikasi

<sup>a)</sup> Capaian tahun 2018;

<sup>b)</sup> Prognosa/estimasi tahun 2019;

<sup>c)</sup> Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019



## B. Ruang Lingkup

RAN-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2021-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi. Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya

ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi<sup>31</sup>.

## C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAN-PG merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Beberapa penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi *gap* untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD. Selain itu rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemic COVID-19.

Menimbang tujuan penyusunan dan posisi strategis RAN-PG, maka RAN-PG 2021-2024 disusun dengan konsep yang berbeda dengan periode sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbedaan Konsep Penyusunan RAN-PG 2021-2024

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang sedang berjalan	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD (untuk daerah)
Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit.
Aspek Ketahanan Pangan dan Gizi	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19

### Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Penyusunan Perpres ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan *Outcome* gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks (Lampiran 1) dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

### Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbuan beraktivitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbuan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working for home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan

cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)** kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis *online*. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya *social/physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan *platform digital* atau *online*.

Dari perspektif distribusi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat **Kementerian Perhubungan** juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat No. AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (*stunting*) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (*prolonged emergency situation*). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan

dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan *physical distancing*.

Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, **Kementerian Kesehatan** telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat COVID-19.

Kehadiran RAN-PG dan RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

**Kehadiran RAN-PG dan RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi.**



PEMANFAATAN

KELEMBAGAAN

KETERJANGKAUAN

KETERSEDIAAN

# BAB 4

# KERANGKA

# PELAKSANAAN AKSI

# PANGAN DAN GIZI

---

## A. Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.<sup>32</sup>

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun teori perubahan penyelenggaraan RAN-PG 2021-2024 sebagaimana tersaji pada Gambar 8 yang menunjukkan tahapan perubahan dalam dalam rangka mewujudkan SDM sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing. Sumber daya yang digunakan telah tertuang dalam RPJMN dan RKP di pusat dan RPJMD dan RKPD di daerah. RAN-PG dan RAD-PG berisi tujuan strategis, strategi, dan aksi yang menajamkan program dan kegiatan untuk operasionalisasi pencapaian tujuan RPJMN, disertai indikator dan target sebagai outputnya. Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *undernu-*

*tritions* (*stunting, wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
  - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
  - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
  - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
  - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
  - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
  - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
  - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
  - e. Penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
  - f. Penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat.

kat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;

g. Pengembangan sistem logistik pangan; dan

### 3. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

- a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
- b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;
- c. Edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
- f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
- g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- h. Pengendalian pemborosan pangan (food waste);
- i. Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
- j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

### 4. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

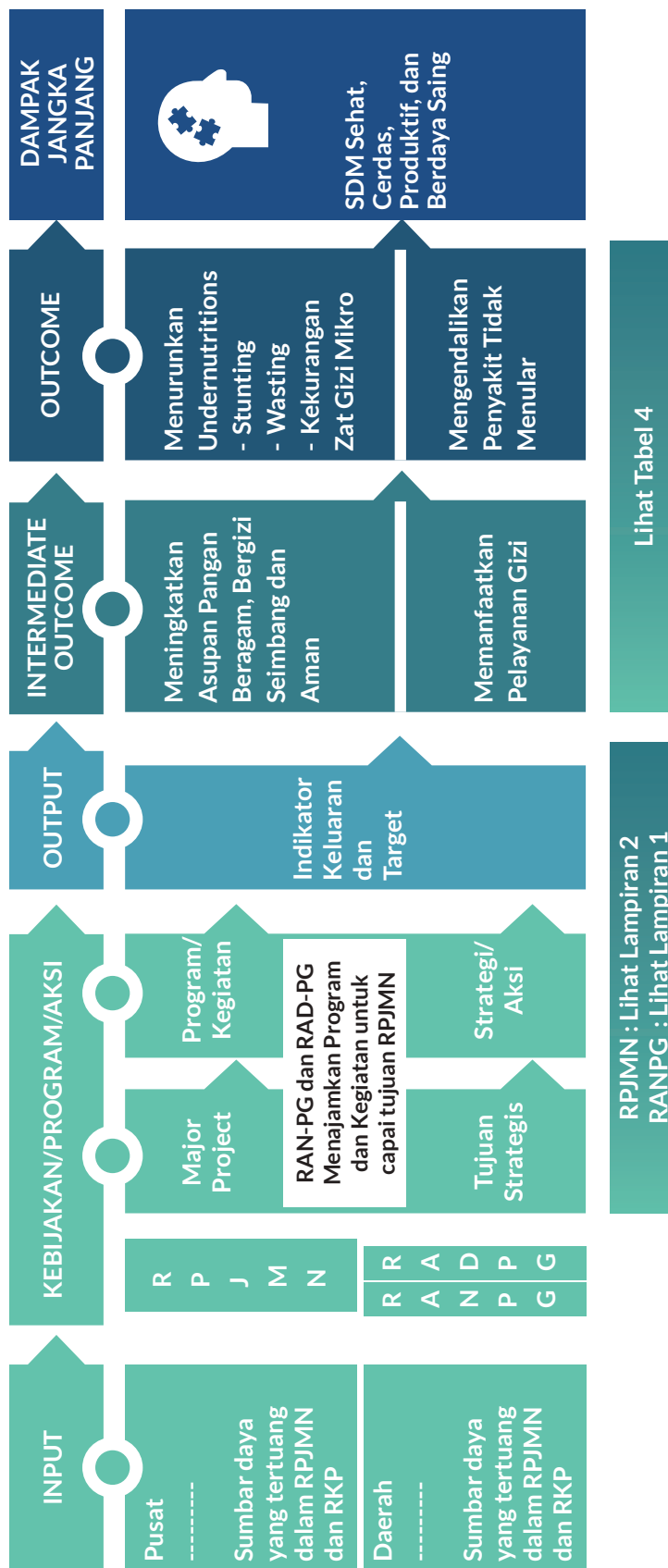
- a. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan;

- b. Penguatan peran sekton non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
- c. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
- d. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Sementara itu, tujuan strategis dan strategi ketahanan pangan dan gizi yang berperan dalam perubahan yang diharapkan berupa *intermediate outcome* dan *outcome* juga terlihat pada Lampiran 1 berupa kerangka pikir. Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman **Lampiran 2** yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Untuk memastikan penyelarasan aksi penajaman kegiatan RAN-PG dan mengisi *gap* kegiatan untuk mempercepat tercapainya RPJMN dan TPB, kegiatan terkait pembangunan pangan dan gizi yang tercantum dalam RPJMN dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga.**

Gambar 8. Teori Perubahan Proses Penyelenggaraan RAN-PG 2021-2024



## B. Pengorganisasian

### Pemerintah Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga (K/L) terkait dan dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan akan ditetapkan dalam.

Dengan mempertimbangkan isu pangan dan gizi yang bersifat multisektoral, pada periode RAN-PG 2017-2019 telah melibatkan 18 Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kementerian Koordinator Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Kemaritiman
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas;
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Pertanian;
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kementerian Perindustrian;
11. Kementerian Sosial;
12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
14. Kementerian Agama;
15. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
18. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mempertimbangkan tugas dan fungsi lembaga lainnya, terdapat lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran strategis untuk dilibatkan dalam penyusunan RAN-PG periode 2021-2024 yaitu:

1. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden) dalam hal ini Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) yang memiliki tugas mendorong sinkronisasi dan konvergensi seluruh perencanaan, implementasi, termasuk pemantauan dan evaluasi pada semua program yang mendukung Strategi Nasional Pencegahan *Stunting*

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terutama urusan sampah makanan (*food waste*);
3. Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara terkhusus pada pemberian insentif kepada daerah dan penetapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan;
4. Kementerian BUMN dalam hal ini Badan Urusan Logistik (BULOG) yang memiliki tugas menjalankan usaha logistik pangan pokok serta menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.
5. Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menguatkan dan mengembangkan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan yang sangat mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas pangan.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kegawatdaruratan seperti bencana yang korban/penderitanya syarat akan kebutuhan pangan dan gizi.
7. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memiliki tugas penetapan kebijakan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. BRIN mengkoordinasikan kegiatan beberapa lembaga pemerintah non kementerian dan berkaitan dengan bidang riset di bidang pangan dan gizi, seperti:
  - a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi sarana kepada pemerintah tentang kebijaksanaan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti LIPI di bidang pangan dan gizi dapat dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RAN-PG.
  - b. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) terkait tugas dan fungsinya dalam pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh produk inovasi di bidang pangan dan gizi sebelum keluar harus lolos uji di BPPT sebelum keluar ijin edarnya.



Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait tugas dan fungsinya dalam pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional dalam mendukung kegiatan produk pangan berfortifikasi.
- d. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terkait tugas dan fungsinya dalam penelitian dan pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir pemanfaatan tenaga nuklir. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh pemanfaatan atom nuklir untuk pencegahan stunting.

RAN-PG selama lima periode telah disusun dengan melibatkan tim pakar dan telah melewati proses konsultasi dan konfirmasi terhadap K/L yang terlibat. Namun untuk pertama kalinya forum koordinasi lintas sektor akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Forum koordinasi tersebut terdiri dari forum koordinasi pengarah, forum koordinasi pelaksanaan dimana forum ini akan diperkuat dengan pelibatan panel pakar.

### Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci mengenai pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi di daerah serta operasionalisasinya dapat dilihat pada Pedoman Penyusunan RAD-PG yang akan ditetapkan bersama RAN-PG.

### C. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya.
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social

control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.

6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

#### D. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAN-PG dan RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing K/L teknis melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi RAN-PG secara mandiri sesuai dengan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing.
2. Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan K/L teknis melalui pertemuan dan evaluasi rutin pelaksanaan RAN-PG.
3. Kementerian PPN/Bappenas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pertemuan regional rutin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas capaian pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan minimal sekali di akhir tahun.
4. Teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG.

Matriks aksi untuk implementasi RAN-PG sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** akan merincikan aksi, indikator dan target yang akan dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan terkait selama periode RAN-PG.

##### Pemantauan RAN-PG

Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAN-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.

##### 1. Substansi pemantauan

Berdasarkan dokumen RAN-PG maka substansi pemantauan adalah:

- a. Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;
- b. Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.

Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non-pemerintah).

##### 2. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah kementerian/lembaga dan atau pemangku kepentingan terkait dengan dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas.

##### 3. Waktu pemantauan

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

##### 4. Umpan balik

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan penyesuaian dan pembelajaran untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah kegiatan pemantauan dilakukan.

#### Evaluasi RAN-PG

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator *masukan*, proses, dan *keluaran*. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator *dampak*. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan *evaluasi* dapat dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode RAN-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 4.

#### E. Mitigasi Risiko

Berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pencapaian target RAN-PG 2021-2024 perlu diidentifikasi dan dicari solusi yang tepat cara pencegahan dan penanganannya. Daftar Risiko yang Berpotensi Dihadapi dalam Penyusunan RAN-PG dan rencana mitigasinya dapat dilihat dalam Lampiran 4 dokumen ini.

#### F. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Untuk menjalankan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian seperti dapat dilihat di dalam RPJMN 2020-2024, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RAN-PG 2021-2024 tidak tersedia secara khusus. Walaupun demikian, Rencana Aksi Pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah dalam menyusun dokumen

perencanaan melalui penajaman program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusat dan daerah) atau sumber lain seperti CSR, donor/mitra pembangunan, serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan sumber pembiayaan dari pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2021-2024.

Mekanisme pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara menambahkan, merevisi, komponen, sub-komponen, ataupun *output*, pada program dan kegiatan Kementerian

dan Lembaga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga.

Sementara itu untuk melakukan mobilisasi sumber daya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan RAN-PG, Kementerian/PPN Bappenas akan melibatkan penuh K/L teknis dalam menyusun aksi penajaman beserta indikatornya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya. Mobilisasi sumber daya difokuskan pada K/L teknis beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi penajaman dalam RAN-PG beserta pendanaannya. Di sisi lain, urusan pembinaan dan pengawasan perihal penetapan RAD-PG oleh Pemerintah Daerah akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

**Pemanfaatan sumber pembiayaan dari pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2021-2024.**



# BAB 5

# PENUTUP

---

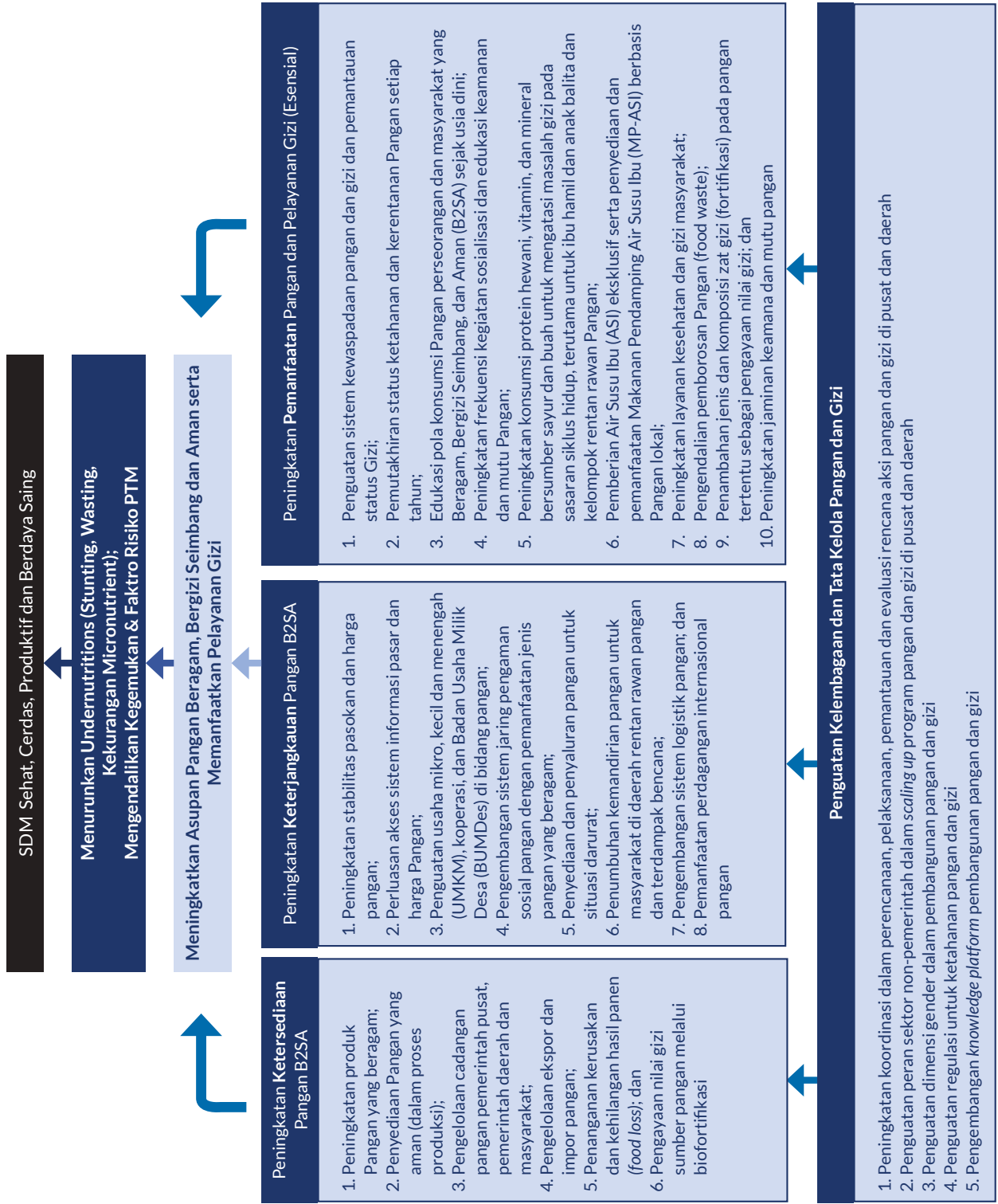
1. RAN-PG disusun oleh Kementerian/Lembaga terkait, secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
2. RAN-PG merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs.
3. RAN-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.
4. RAN-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
  - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA
  - b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA
  - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial)
  - d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
5. Pemantauan RAN-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAN-PG dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode.
6. Pemanfaatan RAN-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah. Di samping itu, RAN-PG ini akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.



# LAMPIRAN

---

Lampiran 1. Kerangka Pikir- RAN-PG 2021-2024





RAN-PG disusun dengan memuat penajaman strategi dan aksi guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan #2 (*menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan*) serta tujuan RPJMN 2020-2024 dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan gender serta dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19.

## Lampiran 2. Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2020-2024

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	K/L/Pemangku Kepentingan yang terkait
<b>Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>							
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Persentasi kabupaten/kota yang membangun/merevitalisasi sentra produksi pangan lokal	Tahun 2024, 50%	- Ketersediaan Beras 46,8 juta ton (2024); - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024); - Produksi jagung 35,3 juta ton (2024); - Produksi daging 4,9 juta ton (2024); - Produksi umbi-umbian 25,5 juta ton (2024); - Peningkatan produksi buah-buahan 5,7% (2024); - Peningkatan produksi sayuran 3,1% (2024) - Penggunaan benih bersertifikat 80% (2024)	Kementan	Kementan, KKP, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa
			Persentasi kabupaten/kota yang membangun/merevitalisasi sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani	Tahun 2024, 50%		Kementan	
			Persentasi kabupaten/kota yang membangun/merevitalisasi sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	Tahun 2024, 50%		Kementan	
			Persentasi kenaikan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di lokasi sentra produksi pangan	Tahun 2024, sayur=3% buah = 5%; pangan hewani=2%; pangan lokal=8%		Kementan	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Persentasi kenaikan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di seluruh kab/kota	Tahun 2024, sayur=3% buah = 5%; pangan hewani=2%; pangan lokal=8%		Kementan	Kementan, KKP, Kemendagri, Kemenkes, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentase desa fokus lokasi penurunan <i>stunting</i> yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan baik melalui P2L dan program daerah.	Tahun 2024, 100%		Kementan	BKKBN, Kemendagri, Kemendesa
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Persentase kota yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan membangun demplot urban <i>farming</i>	Tahun 2024, 50%		Kementan	Kemendagri
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah kab/kota yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit daerah (KBD) secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan. Balai benih/bibit bersertifikat untuk program P2L dan urban <i>farming</i>	Tahun 2024, 514 Kab/Kota		Kementan	Kemendagri
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Persentase jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan bagi pemenuhan konsumsi pangan keluarga yang B2SA di desa lokasi penurunan <i>stunting</i> dan urban <i>farming</i> .	Tahun 2021, 50%		Kementan	Kemendagri, Kemendesa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/kota dan memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di retailer dan pasar tradisional.	Tahun 2024: 514 Kab/Kota	- Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 85-95% (2024); - Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)	Kemendagri (Subdit Perindustrian)	BPOM, Kementan, KKP
			Jumlah kab/kota yang melakukan pembinaan dan perluasan intervensi desa pangan aman	Tahun 2024: 400 Kab/Kota		BPOM	
		Jumlah OKKPD yang bekerja sama berkoordinasi dengan BPOM untuk keamanan pangan segar	Jumlah OKKPD yang bekerja sama berkoordinasi dengan BPOM untuk keamanan pangan segar	Tahun 2024 : 34 Provinsi		Kementan	BPOM, KKP, Kemendagri
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Jumlah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di Provinsi yang telah diverifikasi dan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) oleh Pemerintah Provinsi.	Tahun 2024: 34 provinsi	- Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 85-95% (2024);	Kementan	Kemendagri
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Tahun 2024, 85-90%		Kementan	BPOM, Kemendagri
			Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan	Tahun 2024, 85-90%	- Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 85-95% (2024);	Kementan	KKP, BPOM, Kemenkes, Kemendagri

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Persentase kenaikan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Setiap tahun 10%	- Ketersediaan Beras 46,8 juta ton (2024); - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024);	Kementan	Kemendagri
			Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah menginternalisasi Peraturan Menteri Pertanian No.11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah	Tahun 2023, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota	- Ketersediaan Beras 46,8 juta ton (2024); - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024);	Kemendagri	Kementan
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMIDes)	Persentase kabupaten rentan pangan prioritas 1-3 yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMIDes)	Tahun 2024, 70%	- Ketersediaan Beras 46,8 juta ton (2024); - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024);	Kementan	KKP, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemendes PDPT, SUN Network
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss); dan	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	Persentase kelompok tani yang mendapatkan pelatihan smart farming untuk mencegah food loss	Tahun 2024: 50%	- Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024); - Ketersediaan Beras 46,8 juta ton (2024); - Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024); - Produksi jagung 35,3 juta ton (2024); - Produksi daging 4,9 juta ton (2024); - Produksi umbi-umbian 25,5 juta ton (2024); - Produksi ikan 20,4 juta ton (2024);	Kementan	BPPT, LIPI, SUN Network
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Persentase kelompok tani yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam untuk mengakses informasi mengenai harga dan komoditas yang laku/tidak laku di pasar	Tahun 2024: 50%		Kementan	Kemendagri, SUN Network

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
			Persentase kelompok tani yang mendapatkan pendampingan untuk memahami kalender pertanian setiap daerah yang fokus pada diversifikasi pangan/penataan pola tanam komoditas untuk mencegah <i>overproduction</i> di waktu yang sama	Tahun 2024: 50%	- Produksi daging 4,9 juta ton (2024); - Produksi umbi-umbian 25,5 juta ton (2024); - Produksi ikan 20,4 juta ton (2024);	Kementan	Kemendagri, SUN Network
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i> melalui peningkatan kapasitas	Jumlah industri pangan skala kecil/UMKM yang didampingi//ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pengendalian <i>food loss</i>	Tahun 2024: 2600		BPOM	Kemenkes, Kementan, KemenkopUKM
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tersedianya data <i>food loss</i> setiap tahun	Tahun 2023: 1 Dokumen		Bappenas (Dit. LHK)	Kementan, Kemenperin, Bappenas
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pangkalan data yang memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tahun 2024: 514 Kab/Kota		Kementan	Bulog, Kemendagri, SUN Network
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Tersedianya peta jalan biofortifikasi di Indonesia	Tahun 2022, 1 Dokumen	- Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024); - Luas lahan produksi beras biofortifikasi - 200.000 ha padi (2024); - Ketersediaan beras - 46,8 juta ton (2024); - Penggunaan benih bersertifikat - 80% (2024); - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas - 30 varietas unggul tanaman baru (2024)	Kementan	Kementan, Kemenperin, Kemenkes, Bappenas, Kemensos, SUN Network
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan pokok (selain padi)	Tahun 2024, 5 Komoditi		Kemristek/BRIN	BPPT, LIPI, Kementan (Litbangtan)

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
<b>Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>							
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan/atau OPD Daerah	Tahun 2024, 514 Kab/Kota	Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras < 5% - Cabai < 20% - Bawang Merah < 17% - Telur Ayam < 10% - Daging Ayam < 10%	Kementan	Kemendag, Kemendagri, Bulog
			Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	Tahun 2024, 514 Kab/Kota		Bulog	
			Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilitasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen	Tahun 2024, 514 Kab/Kota		Kementan	Kemendag, Kemendagri, Bulog
			Jumlah lokasi panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen	Tahun 2024, 34 Prov, 514 Kab/Kota		Kementan	Kemendag, Kemendagri, Bulog
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Persentasi TTI center yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	Tahun 2024, 100%	Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras < 5% - Cabai < 20% - Bawang Merah < 17% - Telur Ayam < 10% - Daging Ayam < 10%	Kementan	Kementan, KKP, Kemendagri, Kemenkes, Kemendes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan  Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Persentase Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal  Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan baik nasional maupun daerah (provinsi dan kab/kota)  Tersedianya panduan teknis panel harga pangan komoditas pangan pokok/strategis termasuk sayur dan buah	Tahun 2024, 100%  Tahun 2021-2024, Pusat, 34 Prov, 514 Kab/Kota  Tahun 2022, 1 Dokumen		Bulog  Kementan  Kementan	  Kemendag, Kemendagri, Bulog  Kemendag, Kemendagri, Bulog
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/ Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Persentase UMKM/Koperasi/ BUMDes sektor pangan yang dibina untuk mengembangkan produk berbahan dasar pangan lokal untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Tahun 2024, 50%		Kementan	Kemendes, KemenkopUKM
2.4	Pengembangan sistem jaringan pangan sosial dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Tersedianya pedoman program BPNT yang mencakup sosialisasi beras fortifikasi dan biofortifikasi sebagai bahan pangan yang perlu disediakan  Persentase kab/kota rentan pangan yang menyediakan beras fortifikasi atau biofortifikasi sebagai salah satu bahan pangan untuk program BPNT	Tahun 2022, 1 Dokumen  Tahun 2024, 50%		KemenkoPMK  KemenkoPMK	Kemensos, Bappenas, Kementan, Kemendagri, Bulog



No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/ BPNT	Persentase e-warung yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	Tahun 2024, 100%		Kemensos	Kemenko PMK, BULOG, Kemensos, Kementan, Kemenkes, Bappenas, Kemendagri, Kemendes
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Tersedianya kebijakan pengintegrasian suplementasi gizi dalam program bantuan sosial untuk kelompok marginal (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Tahun 2024, 1 Dokumen		Kemenko PMK	Kemensos, Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, Kemendes PDDT, BNPB; dan Jejaring Percepatan Perbaikan Gizi (SUN Network)
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Persentase Kab/Kota Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Tahun 2024, 75 %		Kementan	Kemendagri, Bulog, Bappenas
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Tahun 2024, 90%		Kementan	Kemenkes, Bappenas, Kemendagri, Kemenhub
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Tersedianya kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pengolahan pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan	Tahun 2022, 2023, 2024: 1 Dokumen		Kemendesa	Kementan, Kemenkes, SUN Network
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Tahun 2024, 90%		Kementan	Kemenkes, Bappenas, Kemendagri, Kemenhub

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Jumlah provinsi yang mengembangkan sistem informasi logistik pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan antar kabupaten/kota	Tahun 2024, 34 provinsi		Kementan	Kemendag, Kemendagri, Kemenhub
		Mengembangkan kerjasama industri <i>start up</i> dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur <i>e-commerce</i>	Persentase kelompok tani yang difasilitasi mendapatkan jaringan distribusi pangan melalui platform penjualan <i>online/e-commerce</i>	Tahun 2024, 50%		Kementan	Kemendagri, Kemendag, Kemenperin, SUN Network
<b>Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>							
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Tersedianya dokumen hasil kesepakatan Kementerian/ lembaga tentang indikator dan mekanisme pengintegrasian (dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan) untuk penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah	Tahun 2021, 1 dokumen	- Prevalensi PoU 5% (2024); - Prevalensi Stunting 14% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi Wasting 7% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Bappenas	Kemendagri, Kemenkes, Kementan, Kemensos, Kemenperin, BPOM, Kemendes PDTT, KKP
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki portal Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tahun 2024, 514 Kabupaten/kota	- Prevalensi Obesitas >18 tahun 21,8% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Bappenas	Kemenkes, Kementan, Kemenperin, BPOM, Kemendes PDTT, KKP
			Jumlah kab/kota yang menyediakan dan menggunakan data skor PPH ketersediaan	Tahun 2024, 514 Kabupaten/kota		Kementan	BPS, Kemendag, Kemendagri, Bulog
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Persentase kabupaten/kota rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam memanfaatkan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan di kabupaten/kota	Tahun 2024, 100%	- Prevalensi PoU 5% (2024); - Prevalensi FIES 4% (2024);	Kementan	Kemendagri, Kemenkes, Bappenas, Kemensos, Kemenperin, BPOM, Kemendes PDTT, KKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	<p>Meningkatkan kegiatan advokasi penggerakragaman konsumsi pangan</p> <p>Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/ pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui komunikasi yang tersedia secara periodik</p> <p>Melakukan pengutanan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)</p> <p>Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas</p>	<p>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penggerakragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye "isi piringku menu khas daerah/ pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi</p> <p>Jumlah provinsi yang melaksanakan kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)</p> <p>Tersedianya dokumen kebijakan yang mengadopsi pesan kunci PGS ke dalam kurikulum dasar, menengah, dan atas</p>	<p>Tahun 2024, 514 Kab/Kota</p> <p>Tahun 2024, 514 Kab/Kota</p> <p>Tahun 2024, 34 Kab/Kota</p> <p>Tahun 2023, 1 Dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 95,2% (2024)</li> <li>- Prevalensi POU 5% (2024)</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024)</li> <li>- Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun (2024)</li> <li>- Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024)</li> <li>- Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024)</li> <li>- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024)</li> <li>- Konsumsi ikan 62,05kg/perkapita/tahun (2024)</li> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> <li>- AKE 2.100 kkal/kapita/hari; 2024);</li> <li>- AKP 57gram/kapita/hari (2024)</li> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> <li>- AKE 2.100 kkal/kapita/hari; 2024);</li> <li>- AKP 57gram/kapita/hari (2024);</li> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024)</li> <li>- <i>disajikan terpilih berdasarkan jenis kelamin;</i></li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - <i>disajikan terpilih berdasarkan jenis kelamin;</i></li> </ul>	<p>Kementan</p> <p>Kemenkes</p> <p>KKP</p> <p>Kemendikbud</p>	<p>Kemenkes, Kemndagri</p> <p>Kementan, Kemendagri, Kominfo</p> <p>Kemenkes, Kementan, Kemendagri</p> <p>Kemenkes, Kemenag</p>

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Tersedianya dokumen kebijakan yang mengadopsi pesan kunci PGS ke dalam kurikulum dasar, menengah, dan atas	Tahun 2023, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> <li>- AKE 2.100 kkal/kapita/hari; 2024);</li> <li>- AKP 57gram/kapita/hari (2024) - Prevalensi stunting 14% (2024)</li> <li>- disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kemendikbud	Kemendes, Kemenag
	Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Persentasi Puskesmas yang melaksanakan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Tahun 2024, 65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Kemenkes	Kemendes, Kemendagri, SUN Network, Kemensos, BKKBN	
	Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah lokasi kampanye digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku makan B2SA	Tahun 2024, 34 Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024)</li> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)</li> </ul>	Kemenkominfo	Kemkes, Kementan, Setwapres, Kemendagri, Bappenas, BKKBN	
	Jumlah jangkauan kampanye digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah jangkauan kampanye digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	22,5juta reach Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024)</li> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)</li> </ul>	Kemenkominfo	Kemkes, Kementan, Setwapres, Kemendagri, Bappenas, BKKBN	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
			Jumlah lokasi kampanye perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui media penyiaran/media tatap muka/media luar ruang/sms blast.	Tahun 2024, 514 Kab/Kota	- Prevalensi POU 5% (2024) - Prevalensi stunting 14% (2024) - <i>disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</i> ; - Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)	Kemkominfo	Kemkes, Kementan, Setwapres, Kemendagri, Bappenas, BKKBN
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA	Tersedianya platform rujukan informasi jurnalis dan media dalam rangka mendukung komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA	Tahun 2022, 1 Dokumen	- Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024); - Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024)	Bappenas	Kemkominfo, Kemenkes, Kementan, BKKBN
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kab/kota yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Tahun 2024, 514	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun 21,8% (2024) - <i>disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</i>	Kemenkes (Promkes)	Kemendagri, Kemenag, Kominfo
		Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah Provinsi yang melaksanakan orientasi <i>agent of change</i> PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik	Tahun 2024, 34 Provinsi	- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024); - Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun 21,8% (2024) - <i>disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</i>	Kemenkes (P2PTM)	34 Kementerian/ Lembaga, Kemendagri
			Jumlah Provinsi yang telah menetapkan <i>agent of change</i> PTM	Tahun 2024, 34 Provinsi		Kemenkes (P2PTM)	
			Jumlah Kementerian/Lembaga yang memiliki <i>agent of change</i> PTM	Tahun 2024, 34 K/L		Kemenkes (P2PTM)	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah tim penggerak PKK (kabupaten/kota) yang mendapatkan peningkatan kapasitas/pendampingan perempuan (untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak)	Tahun 2024, 514	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram kapita/tahun (2024)</li> <li>- Prevalensi obesitas pada penduduk &gt; 18 tahun 21,8% (2024)</li> </ul>	KemenPPPA	Kemenkes, Kementan, Kemendagri Kemendesa
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan produsen pangan olahan industri rumah tangga dan siap saji berskala kecil terkemas sesuai regulasi terkini yang berlaku terkait pencantuman informasi kandungan GGL	Tahun 2024, 514	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun 21,8% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	BPOM	Kemenkes, Kementan, Kemendagri, Kementan, Bappenas
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Tahun 2024, 400	- Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024);	BPOM	Kemenkes, Kemendikbud

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;	<p>Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota</p> <p>Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani</p>	<p>Jumlah Kab/kota yang mengembangkan isi piringku dengan pangan lokal</p> <p>Tersedianya dokumen peta jalan diversifikasi pangan</p>	<p>Tahun 2024, kab/kota</p> <p>Tahun 2023, 1 Dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 95,2% (2024)</li> <li>- Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024)</li> </ul>	<p>Kemenkes</p> <p>Kementan</p>	<p>Kementan, Kemendagri</p> <p>Kemendagri, Kemendesa, Kemenkes</p>
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	<p>Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal</p>	<p>Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif</p> <p>Jumlah balita kekurangan gizi yang mendapatkan MP-ASI berbahan dasar pangan lokal</p> <p>Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT berbahan dasar pangan lokal</p>	<p>Tahun 2024, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/ Kota</p> <p>Tahun 2024, 290.000 balita</p> <p>Tahun 2024, 84.700 bumil kek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</li> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	<p>Kemenkes</p> <p>Kemenkes</p> <p>Kemenkes</p>	<p>Bappenas, Kemendagri, Kementan, Kemendes PDTT</p> <p>LIPI, Kemendesa, SUN Network</p> <p>LIPI, Kemendesa, SUN Network</p>

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	Persentasi kabupaten/kota yang telah menandatangani komitmen pencapaian cakupan target sasaran suplementasi gizi sebesar 90 % pada tahun 2024	Tahun 2024, 100%	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	BKKBN	Setwapres, Bappenas, KemenkoPMK, Kemendagri
		Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi	Tersedianya produk RUTF berbahan dasar pangan lokal (produksi dalam negeri) yang terstandarisasi  Tersedianya rekomendasi kebijakan pemanfaatan RUTF berbahan dasar pangan lokal (produksi dalam negeri) di Puskesmas	Tahun 2022, 1 Produk  Tahun 2024, 1 Dokumen	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkes  Kemenkes	LIPI, BPOM, BPPT, Kemendes, Setwapres, KemenkoPMK, dan SUN Network
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat pemberian bubuk tabur gizi	Tahun 2024, 290.000 balita	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkes	Kemendagri, Kemendes, dan SUN Network
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Persentasi kabupaten/kota yang melaksanakan skema pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Tahun 2024, 100%	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkes	Kemendagri, Kemendes, dan SUN Network
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Jumlah provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam tata kelola pelayanan gizi bagi kelompok rawan dalam situasi pandemi	Tahun 2024, 34	- Prevalensi stunting 14% (2024); - Prevalensi FIES 4% (2024); - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkes	BNPB, Kemendes, Kemendagri, Kemensos



No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80 % puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	Tahun 2024, 257 Kab/Kota	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemendes	Kemendagri, Kemdikbud, SUN Network
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan kampanye Gerakan Lawan Obesitas (GENTAS)	Tahun 2024, 50%	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemendes	Kemendagri, Kemdikbud, SUN Network
			Persentase kabupaten/kota yang puskesmasnya melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	Tahun 2024, 80%	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemendes	Kemendagri, Kemdikbud, SUN Network
			Persentase anak obesitas usia sekolah (7-18 tahun) yang dilaksanakan pengukuran deteksi dini PTM	Tahun 2024, 50%	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemendes	Kemendagri, Kemdikbud, SUN Network
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Tersedianya modul/pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/kota yang telah memuat pengendalian dampak COVID-19 terhadap pembangunan pangan dan gizi	Tahun 2021, 1 Dokumen	Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Bappenas	Bappenas, Kemendagri, Setwapres, KemenkoPMK
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19	Persentase pekerja perempuan (kelompok 1000 HPK dan perempuan usia pra-nikah) yang mendapatkan suplementasi gizi pada pandemi COVID-19 dan kondisi kegawatdaruratan lainnya	Tahun 2024, 80%	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Kemendes (Kesjaor)	Kemensos, Kemenperin, KemenPPPA, SUN Network

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
3.8	Pengendalian pemborosan pangan ( <i>food waste</i> );	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelatihan bagi organisasi masyarakat (pemuda atau perempuan) dalam rangka penanganan limbah makanan melalui gerakan 4R ( <i>reuse, reduce, recycle, replace</i> ) atau <i>composting</i>	Tahun 2024: 514 Kab/Kota	- Prevalensi POU 5% (2024);	KLHK	Kementan, Kemenperin, Kominfo, SUN Network
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan <i>imperfect</i>	Tersedianya platform untuk membantu distribusi pangan berlebih/ <i>ugly food</i> /sisa makanan dalam mencegah terjadinya <i>food loss</i>	Tahun 2024: 1 Dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024);	Kemendag	Kementan, KLHK
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i>	Jumlah nota kesepahaman bersifat sukarela ( <i>voluntary agreement</i> ) dengan produsen/industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i>	Tahun 2024: target dikonsultasikan	- Prevalensi POU 5% (2024)	KLHK	Bappenas, Kemenperin, Kementan Kemenpar
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i>	Tersedianya data <i>food waste</i> setiap tahun	Setiap Tahun : 1 dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024)	KLHK	BPS, Kementan, Kemenperin, Bappenas
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pangkalan data yang memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tahun 2024: 514 Kab/Kota	- Prevalensi POU 5% (2024)	KLHK	Kemendagri, BPS, SUN Network

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	<p>Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada</p> <p>Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi</p> <p>Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi</p>	<p>Tersedianya peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia</p> <p>Jumlah industri yang mengembangkan fortifikan dan kernel dalam negeri</p> <p>Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung koordinasi, pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran pangan fortifikasi wajib</p> <p>Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan pengawasan terhadap NSPK SNI wajib tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi</p> <p>Jumlah produsen minyak goreng sawit yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi minyak goreng sawit yang mengandung vitamin A atau provitamin A sesuai SNI terkini yang berlaku (2021)</p>	<p>Tahun 2022, 1 Dokumen</p> <p>Tahun 2024, 5 Dokumen</p> <p>Tahun 2023, 1 Dokumen</p> <p>Tahun 2024, 514 Dokumen</p> <p>Tahun 2021, semua produsen minyak goreng skala besar termasuk repacker</p> <p>Tahun 2021, semua produsen tepung terigu skala besar termasuk repacker</p>	<p>- Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024);</p> <p>- Prevalensi stunting 1.4% (2024) - disajikan terilah berdasarkan jenis kelamin;</p> <p>Prevalensi stunting 1.4% (2024) - disajikan terilah berdasarkan jenis kelamin</p>	<p>Kemendes</p> <p>Kemenperin</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemenperin (BSKJI)</p> <p>Kemenperin/BSKJI</p>	<p>Kementan, Kemenperin, BPOM, Bappenas, Kemensos</p> <p>Kemenperin, BSN, Bappenas</p> <p>Kemenko PMK, BPOM, KKP, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BSN, Kementan, Bappenas</p> <p>Kemenko PMK, BPOM, KKP, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BSN, Kementan, Bappenas</p> <p>BPOM, Kemendes, BSN, Kemenkes, Kementan, Bappenas, SUN Network</p> <p>BPOM, Kemendes, BSN, Kemenkes, Kementan, Bappenas, SUN Network</p>

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait		
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong ditetapkan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru	Persentasi sentra produksi garam rakyat yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi garam konsumsi berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Tahun 2024, 90%		KKP	Kemendes, Kemendagri, BPOM, BSN, Kementan, Kemendag		
			Persentasi produk minyak goreng sawit terdaftar yang beredar dan mengandung vit A dan/ atau pro Vitamin A	Tahun 2024, 90%		BPOM	Kemenperin, Kemendag, BSN, Kemendes, Kementan, Bappenas, SUN Network		
			Persentasi tepung terigu terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	Tahun 2024, 90%		BPOM	Kemenperin, Kemendag, BSN, Kemendes, Kementan, Bappenas, SUN Network		
		Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat/"healthy choice" pangan siap saji	Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat/"healthy choice" pangan siap saji	Persentasi garam konsumsi terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	Tahun 2024, 75%			BPOM	Kemenperin, Kemendag, BSN, Kemendes, Kementan, Bappenas, SUN Network
				Tersedianya regulasi mengenai penetapan barang kena cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan	Tahun 2024, 1 Dokumen	- Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkeu	Kemendes, Bappenas, BPOM, Kemenperin, Kemendag, Kemenko Ekonomi	
				Diterbitkannya regulasi yang mengatur syarat dan pemberlakuan "pilihan lebih sehat" untuk pangan siap saji termasuk mekanisme pengawasannya	Tahun 2024, 1 Dokumen	- Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024); - Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Kemendes	BPOM, BSN, Kemendag	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
<b>Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>							
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi dengan penurunan stunting	Tersedia dan berfungsi forum koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor di pusat Jumlah provinsi/Kab/Kota yang menetapkan forum untuk koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor	Tahun 2021, 1 Dokumen Tahun 2024, 34 Provinsi Tahun 2024, 514 Kab/Kota	- Skor PPH 95,2 (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemendagri Kemendagri Kemendagri	27 K/L yang terlibat dalam forum koordinasi RAN-PG Kemendagri, Bappenas Kemendagri Kemendagri, Bappenas
	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi RAN-PG 2020-2024 serta pedoman penyusunan RAD-PG	Tahun 2021, 34 Provinsi	- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemendagri Kemendagri	Bappenas, Kementan, Kemendagri
			Jumlah Provinsi mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	Tahun 2022, 1 Dokumen Tahun 2024, 34 Provinsi	- Skor PPH 95,2 (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemendagri	Kemendagri, Bappenas
			Persentasi kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	Tahun 2024, 50%		Kemendagri	Kemendagri, Bappenas

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah)  Tersedianya peta kontribusi aksi dan sebaran mitra gernas Percepatan Perbaikan Gizi (PPG) di tingkat pusat  Persentasi kabupaten/kota yang memiliki peta kontribusi aksi dan sebaran mitra gernas Percepatan Perbaikan Gizi (PPG) di wilayahnya  Tersedianya pedoman pencegahan konflik kepentingan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan Gizi  Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman (B2SA)	Tahun 2024, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota  Tahun 2024, 1 Dokumen  Tahun 2024, 80%  Tahun 2022, 1 Dokumen  Tahun 2024, 80% anggota SUN Bussines Network Indonesia	- Skor PPH 95,2 (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin    - Skor PPH 95,2 (2024); - AKE 2.100 kkal/kapita/hari (2024); - AKP 57 gram/kapita/hari (2024); - Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024); - Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Bappenas  Bappenas  Bappenas  Bappenas  Bappenas	Bappenas, Setwapres, Kementan, Kemendagri, SUN Network  Bappenas, Setwapres, Kementan, Kemendagri, SUN Network  Bappenas, Setwapres, Kementan, Kemendagri, SUN Network  Kemendagri, Setwapres, SUN Network  Kemenperin, Kemenkes, Kementan, Setwapres, SUN Network
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.					

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku dalam mencegah food waste dan food loss  Tersedianya modul/pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/kota yang telah memuat aksi PUG dan PPRG  Jumlah K/L bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya  Jumlah K/L bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya  Jumlah provinsi yang memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	Tahun 2024, 50% anggota SUN Bussines Network Indonesia  Tahun 2022, 1 Dokumen  Tahun 2024, 24 k/l yang terlibat dalam RANPG  Tahun 2024, 34  Tahun 2024, 34	- Skor PPH 95,2 (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin  - Skor PPH 95,2 (2024); - Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Bappenas  Kemen PPPA  Kemen PPPA  Kemen PPPA  Kemen PPPA	Kemenperin, Kemenkes, Kementan, Setwapres, SUN Network  Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri  Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri  Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri  Kemenkes, Kementan, Kemendagri
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah organisasi perempuan (kabupaten/kota) yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Tahun 2024, 514	Prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun 21,8% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Kemenkes	Kemendagri, Kemdikbud, SUN Network

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mengembangkan mekanisme pengorganisasian sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Tersedianya pedoman berisi mekanisme pengawasan sosial yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Tahun 2022, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 7% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Kemendes	Kemendagri, SUN Network
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Provinsi/kabupaten/kota yang menetapkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Tahun 2024, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 100%;</li> <li>- Luas lahan Produksi beras biofortifikasi 200.000 ha;</li> <li>- Ketersediaan beras 46,8 juta ton</li> <li>- Prevalensi POU 5% (2024);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024)</li> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> </ul>	Kementan	Kemendagri, Kemendes, BPN/ATR
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptability</i> , <i>harga</i> , <i>shelf life</i> ) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Tersedianya kajian produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi Diterbitkannya kebijakan terkait pemanfaatan produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Tahun 2022, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas lahan Produksi beras biofortifikasi 200.000 ha;</li> <li>- Ketersediaan beras 46,8 juta ton</li> <li>- Prevalensi POU 5% (2024);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024)</li> <li>- Skor PPH 95,2 (2024);</li> </ul>	Kementan	BPPT, LIPI, BATAN, Kementan, KKP, Kemenkes, BPOM, SUN Network
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>	Jumlah publikasi mengenai inovasi <i>smart farming</i> dalam mencegah <i>food loss</i> yang diadopsi menjadi program pemerintah	Tahun 2024, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024)</li> </ul>	BRIN	Kementan, BPPT, KKP, Bappenas
4.5	Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Melakukan kajian <i>gap analysis</i> program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia	Tersedianya rekomendasi kebijakan terkait pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia	Tahun 2021, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kementan	Kementan, SUN Network



No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Tersedianya rekomendasi kebijakan terkait pemberian suplementasi multigizi mikro untuk ibu hamil	Tahun 2022, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kemendes	Bappenas, BPPT, LIPI, BPOM, dan Jejaring Percepatan Perbaikan Gizi (SUN Network)
		Mengembangkan <i>community based data</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro ditingkat kabupaten/kota	Tersedianya dokumen hasil pemetaan masalah gizi mikro yang terintegrasi dengan pelaksanaan Riskeddas/Riskenas	Tahun 2023, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kemendes	Kementan, Kemenristek/BRIN, BPS
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah publikasi riset ilmiah biofortifikasi di berbagai komoditi pangan (selain padi)	Tahun 2024, 5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kemristek/BRIN	LIPI, Kementan (Litbang)
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala	Jumlah publikasi riset ilmiah fortifikasi pada komoditi pangan yang memiliki potensi sebagai kendaraan fortifikasi wajib	Tahun 2024, 5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kemristek/BRIN	LIPI, Kementan (Litbang)
			Terselenggaranya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi minimal 4 tahun sekali	Tahun 2024, 5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan -sebanyak 15 hasil riset (2024);</li> <li>- Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024)</li> </ul>	LIPI	Bappenas, 25 K/L lainnya yang terlibat dalam RAN-PG
			Terselenggaranya workshop nasional fortifikasi pangan minimal dua tahun sekali	Tahun 2022, 1 Kali Tahun 2024, 1 Kali		Bappenas	Kemristek/BRIN, LIPI, BPPT Kemenkes, Kementan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 yang Didukung	Penanggung Jawab	Kementerian/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan yang terkait
		Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Tahun 2024, 10 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi stunting 14% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi wasting 9% (2024) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Kementan (Litbangtan)	Kemristek/BRIN, LIPI, BPP, SUN Network
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Jumlah publikasi riset ilmiah untuk mendukung produksi RUTF dalam negeri berbahan dasar lokal	Tahun 2024, 4 Dokumen		Kemenkes (Litbangkes)	Kemristek/BRIN, LIPI, BPP, SUN Network
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Jumlah publikasi riset ilmiah kajian literasi gizi pada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu	Tahun 2024, 5 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024);</li> <li>- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024);</li> </ul>	Kemenkes (Litbangkes)	Kementan (Litbangtan), Kemristek/BRIN, LIPI, SUN Network
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia	Tersedianya TKPI/DKBM yang diperbaharui setiap tahun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia	Tahun 2022, 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 95,2% (2024);</li> <li>- AKE 2.100 kkal/kapita/hari (2024);</li> <li>- AKP 57 gram/kapita/hari (2024);</li> </ul>	Kemenkes (Litbangkes)	Kementan (Litbangtan), BKP Kementan, BPOM, BATAN, Kemristek/BRIN, LIPI

Lampiran 3. Program dan Kegiatan Bidang Pangan dan Gizi dalam Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
1	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN</b>		
	<b>ProP : Pengembangan program jaminan sosial</b>		113
	Peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (juta)	
	<b>ProP : Penurunan Stunting</b>		
	<b>Pembinaan Gizi Masyarakat</b>		10
	Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10
	Suplementasi gizi mikro pada balita	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	290.000
	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	85
	Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	100
	<b>Pembinaan Kesehatan Keluarga</b>		
	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	514
	Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal	960
	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		
	Pembinaan Kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan Gernas	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gernas	50
	Penyusunan pedoman/regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Gernas	Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Gernas	15
	Pembinaan posyandu aktif	Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
<b>Penyehatan Lingkungan</b>			
	Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	90
	Pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	76
<b>Surveilans dan Karantina Kesehatan</b>			
	Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95
	Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat	95
	Respon peringatan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB ( <i>alert systems</i> )	80
<b>Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan</b>			
	Penyediaan obat gizi	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	100
	Penyediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	95
<b>2 KEMENTERIAN PERTANIAN</b>			
<b>ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan</b>			
	Pekarangan Pangan Lestari	Terbinanya kelompok pemanfaatan pekarangan (Lokasi)	25.000
	Pekarangan Pangan Lestari <i>Stunting</i>	Terlaksananya intervensi <i>stunting</i> (Lokasi)	500

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	<b>ProP : Stabilisasi Harga Pangan</b>		
	Lumbung Pangan Masyarakat	Terbinanya lumbung pangan masyarakat (Unit)	225
	Lembaga Distribusi Pangan	Terbinanya lembaga distribusi pangan (Unit)	1.000
	Pengelolaan Informasi Pemasaran	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran (Lokasi)	35
	<b>ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat</b>		
	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi)	135
	Pengembangan Pertanian Keluarga/Family Farming	Terbentuknya pertanian keluarga/family farming (Lokasi)	404
	Pertanian Masuk Sekolah	Terbentuknya pertanian masuk sekolah (Lokasi)	340
	<b>ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</b>		
	Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar (Lokasi)	35
	<b>ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan</b>		
	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (hektar)	200.000
	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan (varietas)	1
<b>3</b>	<b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>		
	<b>ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</b>		
	Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	Jumlah kab/kota fokus penurunan stunting (Kab/Kota)	2
	<b>Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri</b>		
	<b>Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri</b>		

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standarisasi Industri	Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	100
4	<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
	<b>ProP :Penurunan Stunting</b>		
	<b>Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan</b>		
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi Gemarikan	34
5	<b>KEMENTERIAN SOSIAL</b>		
	<b>ProP : Penguatan pendampingan masyarakat</b>		
	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	12.000
	<b>ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran</b>		
	Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000
	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM) melalui Program Sembako	15.600.000
6	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK/APBD</b>		
	<b>ProP : Penurunan Stunting</b>		
	<b>Pembinaan Gizi Masyarakat</b>		
	SPALD-T skala kota/regional (KemenPUPR, DAK, APBD)	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala kota	62.352
	SPALD-T skala permukiman (KemenPUPR, DAK, Pemda)	Jumlah sambungan rumah tangga yang terhubung SPALD-Terpusat skala permukiman	284.245
	SPALD-S skala kota (IPLT) (Kemen PU&PERA)	Jumlah IPLT terbangun (unit)	151

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	SPALD-S skala individu (KemenPUPR, DAK, Pemda, Masyarakat)	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	2.940.304
	Implementasi dokumen SSK (KemenPUPR, Pemda)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kabupaten/kota)	52
	Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kabupaten/kota)	88
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman</b>		
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)	6.270
	SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR)	21.663
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit)	151
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman</b>		
	NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Jumlah NSPK yang tersusun (unit)	1
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>		
	Perluasan SPAM	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)	262.679
	<b>PP: Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>		
	Indikator dan Target PP (2024)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah layak (%) dan aman (%))	90 Layak 15 Aman
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka (%)	0,0
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) dan aman (%))	100 Layak 15 Aman

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
7	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>ProP : Penurunan Stunting</b>  <b>Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga</b>	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	51.000
	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>		
	<b>ProP : Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah</b>		
	Anak Usia Dini Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh Pengasuhan dan Perlindungan	6.500
	Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	Jumlah Lembaga PAUD yang Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas	10.000
	Lembaga PAUD Menyelenggarakan Holistik Integratif	Jumlah Lembaga PAUD yang Menyelenggarakan Holistik Integratif	1.200
8	<b>BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)</b>  <b>ProP :Penurunan stunting</b>  <b>Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi</b>		
	Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (keluarga)	4.122.784
	Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29.327
	<b>Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi</b>		
	Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	40



No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
9	<p>Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standarisasi Industri</p> <p><b>BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)</b></p> <p><b>ProP : Penurunan Stunting</b></p> <p>Pengawasan produk pangan fortifikasi</p> <p>Pengawasan pangan olahan sesuai standar di kabupaten/kota</p> <p><b>ProP : Pengembangan Lingkungan Sehat</b></p> <p>Penerapan sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman</p> <p>Penerapan desa pangan aman</p> <p>Intervensi pasar aman dari bahan berbahaya</p>	<p>Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi</p> <p>Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar</p> <p>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman</p> <p>Jumlah desa pangan aman</p> <p>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya</p>	<p>100</p> <p>90</p> <p>350</p> <p>3.400</p> <p>1.105</p> <p>450</p>
10	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA</b></p> <p><b>ProP: Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga</b></p> <p>Bimbingan perkawinan Pra Nikah</p> <p><b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b></p> <p>Keluarga Sakinah yang Terbina</p>	<p>Jumlah pasangan yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah</p> <p>Keluarga Sakinah yang Terbina</p>	<p>738.000</p> <p>18.000</p>
11	<p><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p><b>ProP :Penurunan stunting</b></p> <p><b>Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga</b></p> <p>Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan Stunting</p>	<p>Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya pencegahan stunting</p>	<p>6</p>

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	<p><b>Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan</b></p> <p>Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting bagi provinsi</p>	<p>Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting</p>	4
12	<p><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>ProP : Penciptaan ekosistem inovasi</p> <p>Pengembangan Sistem Inovasi</p> <p>Klaster Inovasi</p>	<p>Jumlah klaster inovasi sebagai wahana kolaborasi N-Helix</p>	5
13	<p><b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)</b></p> <p>Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek (LIPI)</p> <p>Pengembangan Inovasi</p>		
14	<p><b>BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)</b></p> <p>ProP: Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan</p>	<p>Inovasi Teknologi Pangan untuk Mencegah Stunting</p>	1
15	<p><b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>ProP: Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah</p>	<p>Persentase K/L/D yang melaksanakan urusan PIKP dan mitra strategis yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional</p>	90

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	<p><b>ProP : Penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T</b></p>		
	<p><b>Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Pemerintah</b></p>		
	<p>Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka dan pertunra)</p>	<p>Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap konten informasi publik</p>	<p>70</p>
<p>16</p>	<p><b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b></p>		
	<p><b>ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</b></p>		
	<p>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat</p>	<p>Jumlah kab/kota fokus penurunan stunting (Kab/Kota)</p>	<p>2</p>
	<p><b>Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan</b></p>		
	<p>Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan</p>	<p>Terverifikasinya kebutuhan bahan baku industri pangan</p>	<p>4</p>
<p>17</p>	<p><b>KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</b></p>		
	<p><b>ProP : Penerapan SPBE terintegrasi</b></p>		
	<p><b>Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional</b></p>		
	<p>Pembangunan Portal Data Nasional</p>	<p>Terbangunnya integrasi data dan pengelolaan portal data nasional</p>	<p>1 data terintegrasi</p>
	<p><b>Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan</b></p>		
	<p>Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran</p>	<p>Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat (%)</p>	<p>Tahun 2021: 100</p>
		<p>Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah (%)</p>	<p>Tahun 2021: 100</p>
		<p>Persentase Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah (%)</p>	<p>Tahun 2021: 100</p>

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
18	<b>KEMENTERIAN DESA, PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</b>		
	<b>Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa	74.957
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	34
	<b>Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar</b>		
	Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa	Seluruh desa prioritas
19	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>		
	<b>Program Bina Pembangunan Daerah</b>		
	<b>Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah</b>		
	Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	43
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah</b>		
		Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	514
	<b>Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III</b>		
	Peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	514

No	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET 2024
	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi	100
	<b>ProP : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan</b>		
	<b>Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil</b>		
	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun	100
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	100
20	<b>BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)</b>		
	<b>Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>		
	<b>Pengembangan dan Analisis Statistik</b>		

Lampiran 4. Format Pemantauan dan Evaluasi RAN-PG

A. Format Pemantauan dan Evaluasi RAN-PG Tahun .....

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/ Keluaran	K/L Penanggung Jawab	Capaian		Rekomendasi
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan <b>Ketersediaan</b> Pangan B2SA						
Peningkatan <b>Keterjangkauan</b> Pangan B2SA						
Peningkatan <b>Pemanfaatan</b> Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
Penguatan <b>Kelembagaan</b> dan Tata Kelola Pangan dan Gizi						

**B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan RAN-PG Tahun .....**

Tujuan Strategis	Kementerian/ Lembaga	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
Peningkatan <b>Ketersediaan</b> Pangan B2SA					
Peningkatan <b>Keterjangkauan</b> Pangan B2SA					
Peningkatan <b>Pemanfaatan</b> Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)					
Penguatan <b>Kelembagaan</b> dan Tata Kelola Pangan dan Gizi					

\*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

Lampiran 5. Daftar Risiko yang Berpotensi Dihadapi dalam Penyelenggaraan RAN-PG dan Rencana Mitigasinya

Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Penjelasan Risiko	Risiko Bawaan	Indikator dan Pemicu	Aksi Mitigasi	Hal yang Berubah
Pandemi COVID-19 yang bekepanjangan	Konteks Eksternal	Bappenas, K/L pelaksana, mitra gernas percepatan perbaikan gizi	<p>Pandemi COVID 19 mengakibatkan adanya kebijakan pengaturan ulang kerja secara terjadwal untuk kerja di kantor dan kerja dari rumah. Kondisi tersebut menyebabkan tantangan operasional selama konsultasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu respon yang lebih lama untuk proses koordinasi dan pengambilan keputusan untuk kegiatan yang diselenggarakan</li> <li>• Perubahan aturan administrasi di Bappenas,</li> <li>• Tingkat keterikatan peserta rapat yang bisa lebih rendah.</li> </ul> <p>Kemungkinan hambatan penganggaran pelaksanaan RAN-PG juga ada karena <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan COVID-19</p>	<p>a. Kemungkinan: Sangat Mungkin b. Dampak : Major/Besar c. Keseluruhan : Major/Besar</p>	<p>Peningkatan kasus COVID-19 menyebabkan berlanjutan kemungkinan bekerja dari rumah dan anggaran kegiatan dalam RAD-PG</p>	<p>a. Rencana kerja yang penyusunan yang telah disesuaikan dengan situasi COVID b. Untuk memastikan koordinasi reguler dalam tim dan dengan BAPPENAS dan pemangku kepentingan lainnya, perlu diambil langkah-langkah untuk menggunakan platform kerja digital.</p>	<p>a. Langganan platform Zoom Meeting telah dibeli untuk membantu pertemuan online dengan bappenas, pakar, dan pemangku kepentingan terkait b. Komunikasi rutin yang dengan BAPPENAS tentang dampak COVID pada aktivitas penyusunan RAN-PG 2021-2024 dengan menggunakan platform kerja digital</p>
Masih rendahnya komitmen K/L dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG	Konteks Eksternal	K/L pelaksana	<p>Konsep dan pendekatan baru penyusunan RAN-PG pemilihan strategi dan aksi RAN-PG yang diacu sulit dijalankan oleh K/L pelaksanaan, sehingga memungkinkan terealisasi tidak sesuai target</p>	<p>a. Kemungkinan: Mungkin b. Dampak : Major/Besar c. Keseluruhan : Major/Besar</p>	<p>Jumlah aksi dan indikator yang tidak terealisasi sesuai dengan target</p>	<p>Melakukan koordinasi lintas K/L untuk merevisi aksi yang lebih <b>realistis</b> untuk dapat dilaksanakan sesuai kondisi anggaran yang ada</p>	<p>Matriks aksi direvisi dengan kegiatan dan targetnya yang lebih realistis dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi penganggaran yang ada</p>



Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Penjelasan Risiko	Risiko Bawaan	Indikator dan Pemicu	Aksi Mitigasi	Hal yang Berubah
Masih rendahnya jumlah Pemerintah daerah yang menyusun RAD-PG	Konteks Eksternal	Pemerintah Daerah	Konsep dan pendekatan baru penyusunan RAD-PG memungkinkan rendahnya jumlah pemerintah daerah yang menyusun RAD-PG sesuai dengan pedoman yang disediakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemungkinan : Mungkin</li> <li>b. Dampak : Major/Besar</li> <li>c. Keseluruhan : Major/Besar</li> </ul>	jumlah pemerintah daerah yang menyusun RAD-PG sesuai dengan pedoman yang disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggencarkan sosialisasi pedoman penyusunan RAD-PG dengan konsep dan pendekatan pendekatan baru.</li> <li>b. Pendampingan penyusunan dokumen RAD-PG ke daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Pedoman penyusunan RAD-PG.</li> <li>b. Konsep pendampingan daerah secara Bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri</li> </ul>
Belum selesainya penyusunan Peraturan Presiden Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Hubungan dengan Mitra	Bappenas, K/L pelaksana, mitra gernas percepatan perbaikan gizi	Perpres 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi sedang direvisi karena masa berlakunya sudah habis tahun 2019. Salah satu aspek legal yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG diatur dalam Perpres ini, sehingga jika Perpres ini belum ditetapkan, maka RAN-PG juga belum bisa ditetapkan ke dalam Peraturan Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemungkinan : Mungkin</li> <li>b. Dampak : Major/Besar</li> <li>c. Keseluruhan : Major/Besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepentingan politik antar pemangku kepentingan membuat periode diskusi bisa menjadi lebih lama untuk menetapkan Perpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang diprakarsai oleh Kementerian Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengumpulan masukan dalam proses harmonisasi dengan mengirimkan lebih awal format umpan balik</li> <li>b. Mengintensifkan komunikasi melalui pertemuan lain bagi pihak/ instansi yang belum menyetujui naskah RPerpres</li> <li>c. Menguatkan komitmen pada tataran pejabat Eselon 1 Antar-Kementerian untuk segera menyepakati dan menetapkan RPerpres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih menguatkan keterlibatan K/L kunci seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri</li> </ul>

Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Penjelasan Risiko	Risiko Bawaan	Indikator dan Pemicu	Aksi Mitigasi	Hal yang Berubah
Belum selesainya penyusunan Peraturan Presiden Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Hubungan dengan Mitra	Bappenas, K/L pelaksana, mitra Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi	RAN-PG mengisi gap program/ kegiatan yang belum ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> sebagai bentuk sinkronisasi antar-regulasi, sehingga jika Perpres <i>Stunting</i> belum ditetapkan maka belum bisa dipastikan benar-benar sinkron.	<p>a. Kemungkinan : Mungkin</p> <p>b. Dampak : Kecil</p> <p>c. Keseluruhan : Kecil</p>	<p>Kepentingan politik antar pemangku kepentingan membuat periode diskusi bisa menjadi lebih lama untuk menetapkan Perpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang diprakarsai oleh BKKBN</p>	<p>a. Mengoptimalkan pengumpulan masukan dalam proses harmonisasi dengan mengirimbakan lebih awal format umpan balik</p> <p>b. Mengintensifkan komunikasi melalui pertemuan lain bagi pihak/instansi yang belum menyetujui naskah RPEpres</p> <p>c. Menguatkan komitmen pejabat Eselon 1 Antar-Kementerian untuk segera menyepakati dan menetapkan RPerpres</p>	<p>a. Penyederhanaan Matriks Program dan Kegiatan</p> <p>b. Lebih menguatkan keterlibatan K/L kunci seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinasi PMK</p>



## Endnotes

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
2. Godfrey, K.M. and David JP Barker. 2000. Fetal nutrition and adult disease. *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 71: 1344S–1352S
3. Berkman DS, Lescano AG, Gilman RH et al. 2002. Effects of stunting, diarrhoeal disease, and parasitic infection during infancy on cognition in late childhood: a follow-up study. *Lancet*; 359:564–71.
4. Mendez, M.A. and Linda S. Adair. 1999. Severity and Timing of Stunting in the First Two Years of Life Affect Performance on Cognitive Tests in late Childhood. *Journal of Nutrition*, Vol. 129: 1555–1562
5. Kar B., Rao S. & Chandramouli B. 2008. Cognitive development in children with chronic protein energy malnutrition. *Behavioral and Brain Functions* 4, 31.
6. Walker SP, Chang SM, Power CA et al. 2007. Early childhood stunting is associated with poor psychological functioning in late adolescence and effects are reduced by psychosocial stimulation. *J Nutr*;137:2454–9.
7. Webb, K.E. et al. 2005. Parental IQ and Cognitive Development of Malnourished Indonesian Children. *European Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 59
8. UNICEF, 1990. Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries. New York
9. Pollit, E., Gorman, K. S., Engle, P. L., et al. 1995. Nutrition in early life and the fulfillment of intellectual potential. *The Journal of Nutrition*, 125, 1111S-1118S.
10. Spurr G. 1988. Body size, physical work capacity and productivity in hard work: is bigger better? In: Waterlow J, ed. *Linear Growth Retardation in Less Developed Countries*. New York: Vevey/Raven Press
11. Thomas D. & Strauss J. 1997. Health and wages: evidence on men and women in urban Brazil. *Journal of Econometrics* 77, 159–185.
12. O'Leary, Melani. 2020. *A Gender-Transformative Framework for Nutrition: Advancing Nutrition and Gender Equality Together*. World Vision: Canada
13. O'Leary, Melani. 2020. *A Gender-Transformative Framework for Nutrition: Advancing Nutrition and Gender Equality Together*. World Vision: Canada
14. Nafsiah M., et.al. 2018. On the road to universal health care in Indonesia, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet* :392: 581-91
15. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*. 17 October 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
16. Glasco E. & Wagstaff A. 2017. *The Economic Cost of Stunting and How to Reduce Them*. The World Bank
17. Mary S. 2018. How Much Does Economic Growth Contribute to Child Stunting Reductions?. *MDPI*. 6:55
18. Hoddinott J, Alderman H, Behrman JR, Haddad L, Horton S. 2013. The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal and Child Nutrition*; 9(S2): 69–82.
19. Gillespie S. 2017. *Agriculture, Food Systems, and Nutrition: Meeting the Challenge*. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
20. Mannar V, Micha R, et al. 2020. *The 2020 Global Nutrition Report In The Context Of Covid-19*. United Kingdom: Development Initiatives Poverty Research Ltd
21. Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, dan Lynnette M. Neufeld. 2018. 'A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia.' *Maternal & Child Nutrition* 14 (4): e12617. DOI: 10.1111/mcn.12617.
22. Oddo VM, Maehara M, Rah JH. Overweight in Indonesia: an observational study of trends and risk factors among adults and children. *BMJ Open* 2019;9:e031198. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031198

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
24. Scalingupnutrition. 2020. Nutrition and the Sustainable Development Goals <https://scalingupnutrition.org/nutrition/nutrition-and-the-sustainable-development-goals/>
- 25 Asian Development Bank. 2019. Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020–2045. Manila: Asian Development Bank.
- 26 Badan Pusat Statistik (2019) dan Kementerian Pertanian (2018).
- 27 von Grebmer, Klaus, et al. 2019. 2019 Global Hunger Index: The Challenge of Hunger and Climate Change. Bonn: Deutsche Welthungerhilfe
- 28 Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma. 2020. Estimating the Impact of COVID-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56 (2)
- 29 Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, dan Lynnette M. Neufeld. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition* 14
- 30 Diana, Rian, et al. (2013). Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. *Jurnal Gizi Pangan* 8(1),1-8.
- 31 Arif, S, et al. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020. Jakarta: Smeru Research Institute
- 32 World Health Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Strengthening nutrition action: a resource guide for countries based on the policy recommendations of the Second International Conference on Nutrition (ICN2). World Health Organization

